



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang pelaksanaannya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
  - b. bahwa penerapan standar pelayanan minimal perlu dilaksanakan sebagai salah satu upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menyusun rencana aksi daerah penerapan standar pelayanan minimal;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023 – 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II

### RENCANA AKSI DAERAH

#### PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

##### Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM menjadi pedoman dan arahan dalam:

- a. upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar

yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan

- b. pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi dalam upaya pencapaian SPM di Daerah.

### Pasal 3

(1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
  - b. bab II : kondisi dan permasalahan pemenuhan Penerapan SPM;
  - c. bab III : strategi dan pemenuhan Penerapan SPM;
  - d. bab IV : pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM;
  - e. bab V : kesimpulan dan saran.
- (2) Rincian dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENDANAAN

#### Pasal 4

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara.  
pada tanggal ..2 Mei 2025  
BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara.  
pada tanggal ..2 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,



ARY BACHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2025 NOMOR .5

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR .5 TAHUN .2025  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023-2027

DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN JEPARA  
TAHUN 2023-2027

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah (Renaksi Penerapan SPM) Bupati Kabupaten Jepara, sehingga dapat terselesaikan dengan baik

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus dicapai oleh daerah dengan batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Jepara melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Renaksi Penerapan SPM Daerah.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM Daerah ini. Semoga Renaksi Penerapan SPM Daerah ini mampu memberikan perubahan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN .....	2
1.3. KONDISI UMUM WILAYAH .....	2
1.4. TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM .....	21
<b>BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM ..</b>	<b>23</b>
2.1. KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....	23
2.2. PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....	27
<b>BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....</b>	<b>32</b>
3.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI .....	33
3.2. MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM .....	49
<b>BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM</b> <b>.....</b>	<b>231</b>
4.1. PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM .....	231
4.2. PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM .....	236
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>238</b>
5.1. KESIMPULAN .....	238
5.2. SARAN .....	238

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.1.	Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan .....	3
Tabel 1.3.2.	Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Jepara .	5
Tabel 1.3.4.	Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara per Kecamatan Tahun 2023 .....	8
Tabel 1.3.5.	Potensi bencana di Kabupaten Jepara.....	10
Tabel 1.3.6.1.1.	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB 2010 Tahun 2019-2023 (%) .....	11
Tabel 1.3.6.1.2.	PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jepara Tahun 2019-2023 (miliar rupiah).....	12
Tabel 1.3.6.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023 (dalam %).....	13
Tabel 1.3.7.1.	Jenis Komoditas Garis Kemiskinan Makanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	15
Tabel 1.3.7.2.	Jenis Komoditas Garis Kemiskinan Non Makanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 .....	16
Tabel 2.1.1.	Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Jepara Tahun 2022 .....	23
Tabel 2.1.2.	Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Jepara Tahun 2022 .....	24
Tabel 2.1.3.	Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Jepara Tahun 2022 .....	25
Tabel 2.1.4.	Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Jepara Tahun 2022 .....	25
Tabel 2.1.5.	Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Jepara Tahun 2022 .....	25
Tabel 2.1.6.	Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Jepara Tahun 2022.....	26
Tabel 3.1.1.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan.....	38
Tabel 3.1.2.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan .....	43
Tabel 3.1.3.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum .....	43
Tabel 3.1.4.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat .....	45
Tabel 3.1.5.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas .....	45
Tabel 3.1.6.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial .....	48
Tabel 3.2.1.	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Jepara 2023-2027 .....	49
Tabel 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara 2023-2027 .....	63
Tabel 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara 2023-2027 .....	126
Tabel 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara 2023-2027 .....	139
Tabel 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Jepara 2023-2027.....	146
Tabel 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Jepara 2023 - 2027.....	165
Tabel 4.1.	Evaluasi pencapaian indikator SPM.....	235

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.3.1.	Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jepara.....	3
Gambar 1.3.4.	Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Usia Tahun 2023.....	8
Gambar1.3.6.2.	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Kabupaten di sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (%) .....	13
Gambar 1.3.7.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-1023 (Rupiah/Kapita/Bulan) .....	14
Gambar 1.3.7.2.	Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2023 .....	14
Gambar 1.3.7.3.	Target Penurunan Angka Kemiskinan Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026 Beserta Realisasinya .....	16
Gambar 1.3.7.4.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (%) .....	17
Gambar1.3.7.5.	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan) Kabupaten Jepara Tahun 2018-2023.....	17
Gambar 1.3.7.6.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2023 .....	18
Gambar 1.3.7.7.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 .....	19
Gambar 1.3.7.8.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023.....	19
Gambar 1.3.7.9.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 .....	20
Gambar1.3.7.10.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023.....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Jepara menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

## **1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran**

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

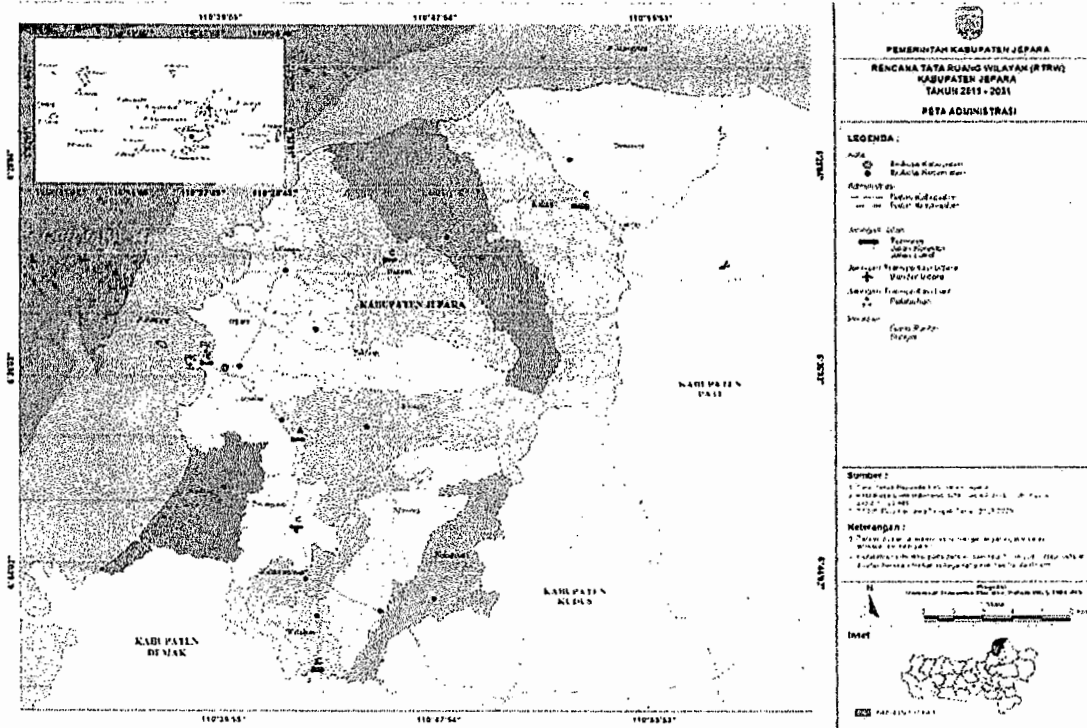
Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

## **1.3. Kondisi Umum Wilayah**

### **1.3.1. Luas Wilayah dan Batas wilayah**

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota di Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi (Kota Semarang) sekitar 71 km. Secara geografis Kabupaten Jepara terletak pada posisi 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur, 5° 43' 20,67" sampai 6° 47' 25,83" Lintang Selatan.

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- Sebelah Selatan : Kabupaten Demak
- Sebelah Barat : Laut Jawa



Sumber: RTRW Kabupaten Jepara Tahun 2023-2043

**Gambar 1.3.1. Peta Wilayah Administratif Kabupaten Jepara**

Kabupaten Jepara meliputi 16 kecamatan, 11 kelurahan, dan 184 desa, 1.015 RW dan 4.766 RT. Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 1.020,25 km<sup>2</sup>, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Keling (121,09 km<sup>2</sup>), dan yang terkecil adalah Kecamatan Kalinyamatan (25,03 km<sup>2</sup>). Luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.3.1.

**Tabel 1.3.1. Luas Wilayah Kabupaten Jepara per Kecamatan**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)	Desa/Kel
1.	Kedung	45,71	4,48	18
2.	Pecangaan	37,08	3,63	12
3.	Kalinyamatan	25,03	2,45	12
4.	Welahan	29,21	2,86	15
5.	Mayong	70,66	6,93	18
6.	Nalumsari	55,25	5,42	15
7.	Batealit	96,20	9,43	11
8.	Tahunan	42,69	4,18	15
9.	Jepara	27,05	2,65	16
10.	Mlonggo	47,52	4,66	8
11.	Pakis Aji	65,18	6,39	8
12.	Bangsri	90,79	8,90	12
13.	Kembang	118,77	11,64	11
14.	Keling	121,09	11,87	12
15.	Donorojo	101,41	9,94	8
16.	Karimunjawa	46,62	4,57	4
	Jumlah	1.020,25	100,00	195

Sumber: Kabupaten Jepara Dalam Angka, 2023

Kabupaten Jepara memiliki kerawanan terhadap beberapa jenis bencana seperti bencana banjir; cuaca ekstrim; tanah longsor; kekeringan; kebakaran hutan dan lahan; epidemi dan wabah penyakit; gempa bumi, gelombang ekstrim dan abrasi; serta banjir bandang.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2022 yang dihitung menggunakan total skor dan total penduduk terpapar, Kabupaten Jepara pada tahun 2022 memiliki Skor IRB 126,18 dengan kategori kelas Risiko Sedang.

Diketahui trend nilai risiko Kabupaten Jepara dari tahun 2015 hingga 2019 tidak mengalami perubahan dengan skor 163,2. Namun pada tahun 2020 hingga 2022 Kabupaten Jepara mengalami penurunan nilai risiko yaitu 148,77 pada tahun 2020; 135,11 pada tahun 2021 dan 122,27 pada tahun 2022.

Berbagai risiko bencana ini perlu diantisipasi, sehingga dampaknya terhadap sektor-sektor strategis seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya dapat dikurangi seminimal mungkin. Risiko bencana dikaji dengan menentukan sifat dan besarnya risiko dengan menganalisa bahaya potensial dan mengevaluasi kondisi kerentanan yang ada. Risiko tersebut dapat menyebabkan ancaman atau membahayakan jiwa, harta benda, mata pencaharian dan lingkungan.

Risiko bencana perlu dipetakan untuk menyusun rencana Penanggulangan bencana dan rencana tindak tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi apabila terjadi bencana.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Jepara Tahun 2023-2027, Di Kabupaten Jepara, bencana yang memiliki kelas risiko tinggi adalah bencana banjir; banjir bandang; banjir rob; cuaca ekstrim; epidemi dan wabah penyakit; gelombang ekstrim dan abrasi; kebakaran hutan dan lahan; kekeringan; dan tanah longsor. Sedangkan bencana yang memiliki kelas risiko rendah adalah bencana gempabumi.

Kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Jepara dapat dilihat pada tabel berikut.

Kecamatan	Banjir	Banjir Rob	Banjir Bandang	Cuaca Ekstrem	Epidemi dan Wabah Penyakit	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Gempa bumi	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tanah Longsor
Bangsri	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Batealit	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Donorojo	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Jepara	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
Katinyamatan	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Karimunjawa	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Rendah	Tinggi	Rendah	-	Tinggi	-
Kedung	Tinggi	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Keling	Sedang	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang	Tinggi	Sedang
Kembang	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Mayong	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Mlonggo	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Halunisari	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	Rendah	Tinggi	Tinggi
Pakis Aji	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Rendah	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Pecangaan	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
Tahunan	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
Welahan	Tinggi	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	-	Sedang	-	Tinggi	Tinggi
Bangsri	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi

Sumber : Kajian Risiko Bencana Kab. Jepara Tahun 2023-2027

### 1.3.2. Topografi

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Jepara cukup bervariasi yang dapat dibagi dalam empat kelompok yakni wilayah pantai di pesisir Barat dan Utara, wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan, wilayah pegunungan di bagian Timur, dan wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara merupakan serangkaian Kepulauan Karimunjawa. Kabupaten Jepara memiliki variasi ketinggian antara 0 m sampai dengan

1.301 mdpl (dari permukaan laut), daerah terendah adalah Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl yang merupakan dataran pantai, sedangkan daerah yang tertinggi adalah Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl merupakan perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu datar 41.327,060 Ha, bergelombang 37.689,917 Ha, curam 10.776 Ha dan sangat curam 10.620,212 Ha. Sebagai akibat dari wilayah yang cenderung ke arah kawasan pesisir pantai. Ketinggian beberapa wilayah kecamatan dari permukaan laut di Kabupaten Jepara ditunjukkan pada Tabel 1.3.2.

**Tabel 1.3.2. Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Jepara**

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Tinggi (mdpl)
1	Kedung	Bugel	0 - 2
2	Pecangan	Lebuawu	2 - 17
3	Katinyamatan	Margoyoso	2 - 29
4	Welahan	Kalipucang Kulon	2 - 7

5	Mayong	Pelemkerep	13 - 438
6	Nalumsari	Gemiring Lor	13 - 736
7	Batealit	Mindahan	68 - 378
8	Tahunan	Tahunan	0 - 46
9	Jepara	Panggung	0 - 50
10	Mlonggo	Jambu	0 - 300
11	Pakis AJi	Lebak	0 - 1.000
12	Bangsri	Bangsri	0 - 594
13	Kembang	Jinggotan	0 - 1.000
14	Keling	Kelet	0 - 1.301
15	Donorojo	Tulakan	0 - 619
16	Karimunjava	Karimunjava	0 - 100

Sumber : Kabupaten Jepara Dalam Angka, 2023

### 1.3.3. Hidrologi

Kabupaten Jepara termasuk dalam wilayah Sub DAS Jratun Seluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi, dan Juana). Aliran sungai ini titik beratnya diarahkan pada pemanfaatan secara optimal sekaligus rehabilitasi terhadap sumber alam hutan, tanah dan air yang rusak serta untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang dapat memberikan pengaruh pada sektor lain. Sungai-sungai besar yang dijumpai di Kabupaten Jepara diantaranya : Sungai Bakalan, Kaweden, Pecangaan, Troso, Sirahan, Mlonggo, Kancilan, Balong, Gelis, Pasokan, Tunggul, Mayong, Sengon, Kedung Bule, Tuk Abul, Bapangan, Kembar Rawi, Banjaran, Jeruk, Wangkong, Blitar, Wareng dan Suru. Potensi air permukaan tanah dan air dalam tanah di daerah Kabupaten Jepara cukup besar. Air Permukaan umumnya berupa sungai. Air dalam tanah dapat dibagi 3 daerah menurut keadaan airnya, yaitu:

- a. Daerah air tawar, meliputi daerah kaki Gunung Muria, mempunyai mutu air yang baik dan digunakan sebagai sumber air minum.
- b. Daerah air tanah payau, meliputi daerah dataran rendah yang merupakan batas antara air tanah asin dengan air tanah tawar. Persebaran akuifernya tidak merata pada tiap tempat dengan ketebalan antara 2-7 m. Air ini relatif masih bisa digunakan.
- c. Daerah air asin, meliputi daerah dataran di pinggiran pantai atau pantai yang menjorok ke daratan.

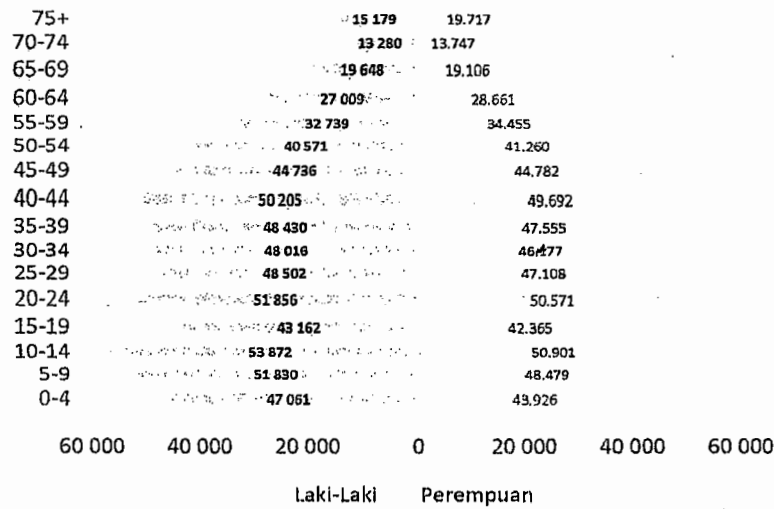
Sungai di Kabupaten Jepara secara umum berasal dari Gunung Muria bagian barat yang mengalir sungai-sungai besar yang memiliki beberapa anak

sungai. Sungai-sungai besar tersebut antara lain Sungai Gelis, Keling, Jarakan, Jinggotan, Banjaran, Mlonggo, Gung, Wisu, Pecangaan, Bakalan, Mayong dan Tunggul. Berdasarkan karakteristik topografi wilayah, aliran sungai relatif dari daerah hulu di bagian timur (Gunung Muria) ke arah barat (barat daya, barat, dan barat laut) yaitu daerah hilir (Laut Jawa). Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Jepara sebagian berasal dari Wilayah Sungai (WS) Jrantonseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi dan Juana) dan Wilayah Sungai (WS) Wisu Gelis. Total keseluruhan jumlah DAS di Kabupaten Jepara yang masuk dalam Wilayah Sungai Jrantonseluna dan Wilayah Sungai Wisu Gelis adalah 34 DAS dimana tujuh (7) DAS termasuk Wilayah Sungai Jrantonseluna dan 27 DAS termasuk Wilayah Sungai Wisu Gelis (Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai).

Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Airtanah menjadi sumber air penting yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat baik untuk rumah tangga (kebutuhan domestik), industri, maupun pertanian. Kawasan Jepara ini terdiri atas 4 sistem geohidrologi secara luas yaitu Non-CAT dan CAT Kudus, CAT Jepara, dan CAT Pati-Rembang. Cekungan Air Tanah (CAT) Kudus terletak pada sisi selatan Kabupaten Jepara, CAT Jepara berada di sisi utara hingga tengah Kabupaten Jepara. Dan untuk CAT Pati-Rembang berada di paling utara Kabupaten Jepara atau sisi barat laut dari Kecamatan Donorojo.

#### **1.3.4. Demografi**

Menurut Data BPS Kabupaten Jepara, jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebanyak 1.264.598 jiwa, terdiri dari 636.096 laki-laki dan 628.502 perempuan. Kategori umur penduduk Kabupaten Jepara sebagian besar adalah penduduk usia produktif, yaitu 867.852 jiwa yang berusia antara 15-64 tahun atau 68,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara sedang berada dalam sebuah kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif (15 tahun - 64 tahun) di suatu wilayah lebih besar dari jumlah penduduk usia tidak produktif (kurang dari 14 tahun dan di atas 65 tahun). Sementara itu, angka ketergantungan di Kabupaten Jepara pada Tahun 2022 mencapai 42,93% (data tahun 2023 belum rilis). Hal ini berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sekitar 42 orang penduduk usia non produktif. Jumlah penduduk tahun 2022 berdasarkan usia secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 1.3.4. Jumlah Penduduk Kabupaten Jepara Berdasarkan Usia Tahun 2023**

Kepadatan penduduk Kabupaten Jepara pada Tahun 2023 adalah 1.240 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan sebaran kepadatan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jepara (3.148 jiwa/km<sup>2</sup>), sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Karimunjawa (228 jiwa/km<sup>2</sup>). Detail persebaran penduduk berdasarkan kecamatan dan kepadatannya adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.3.4. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Jepara per Kecamatan Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
1	Kedung	82.574	45,71	1.807
2	Pecangaan	90.126	37,08	2.431
3	Kalinyamatan	65.608	25,03	2.621
4	Welahan	81.688	29,21	2.796
5	Mayong	97.545	70,66	1.381
6	Nalumsari	81.634	55,25	1.477
7	Batealit	90.565	96,2	941
8	Tahunan	115.700	42,69	2.710
9	Jepara	85.151	27,05	3.148
10	Mlonggo	89.207	47,52	1.877
11	Pakisaji	63.910	65,18	980
12	Bangsri	105.532	90,79	1.162
13	Kembang	74.307	118,77	626
14	Keling	68.047	121,09	562
15	Donorojo	62.395	101,41	615
16	Karimunjawa	10.609	46,62	228
	<b>Jumlah</b>	<b>1.264.598</b>	<b>1.020,26</b>	<b>1.240</b>

Sumber: Kabupaten Jepara Dalam Angka, 2023

### **1.3.5 Kawasan Rawan Bencana**

Potensi bencana di Kabupaten Jepara sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, iklim dan jenis tanahnya. Banjir merupakan salah satu bencana pada aspek kondisi hidrologi. Terjadinya banjir dipengaruhi oleh besarnya debit curah hujan dan durasi hujan. Selain dipengaruhi oleh curah hujan, besar kecilnya kejadian banjir juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menampung besaran debit curah hujan. Curah hujan tinggi yang didukung oleh kondisi topografi berupa dataran rendah maka akan berpengaruh terhadap banjir. Menurut laporan RPJMD Kabupaten Jepara, wilayah yang rawan terdampak oleh bencana banjir merupakan wilayah yang memiliki topografi berupa dataran rendah yang diikuti dengan curah hujan yang tinggi meliputi wilayah Kecamatan Pecangaan, Kalinyamatan, Welahan, Mayong, Nalumsari, dan Kedung. Selain itu, kurang optimalnya daya tampung sungai sungai besar seperti Sungai Wiso, Sungai Gelis, dan lain - lain yang melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Jepara dalam menampung debit aliran mengakibatkan meluapnya aliran sungai menjadi faktor penting dalam peningkatan potensi terjadinya bencana banjir di Kabupaten Jepara.

Selain berdampak pada potensi bencana banjir, curah hujan tinggi dengan durasi hujan yang cukup lama pada wilayah yang memiliki kondisi topografi berupa kemiringan lereng yang memberikan pengaruh terhadap potensi bencana tanah longsor. Informasi mengenai jenis dan karakteristik tanah juga menjadi aspek penting dalam analisis tanah longsor karena jenis tanah yang berbeda memiliki response yang berbeda terhadap potensi bencana tertentu, seperti misalnya pada tanah yang memiliki sifat mudah mengembang pada saat musim kemarau maka akan menimbulkan rekahan. Saat musim hujan rekahan yang berada pada lahan berlereng akan menjadi pintu masuk aliran air sehingga menambah massa tanah yang kemudian akan mengakibatkan rawan terhadap bencana tanah longsor. Berdasarkan laporan RPJMD Kabupaten Jepara, daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor berada di wilayah kawasan rawan gerakan tanah diantaranya Kecamatan Mayong, Kembang, dan Keling.

Sementara itu, bencana lain yang berkaitan dengan kondisi hidrometeorologi di Kabupaten Jepara adalah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat dan angin kencang atau disebut dengan bencana cuaca ekstrim. Dinamika kejadian masing-masing jenis bencana di Kabupaten Jepara sangat beragam. Berdasarkan inventarisasi

sejarah kejadian bencana dan potensi kejadian bencana berdasarkan metode pengkajian risiko bencana, maka ditetapkan Kabupaten Jepara memiliki 3 potensi bencana dengan indeks risiko seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1.3.5.

**Tabel 1.3.5. Potensi Bencana di Kabupaten Jepara**

No	Jenis Bencana	Skor	Kelas Risiko
1	Banjir	20,36	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	11,54	Sedang
3	Tanah Longsor	13,56	Tinggi

*Sumber: IRBI, 2022*

Hasil analisa IRBI menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara memiliki risiko tinggi untuk bencana banjir dan tanah longsor, sementara bencana cuaca ekstrim dan tanah longsor memiliki kelas risiko yang sedang. Analisis risiko yang dilakukan di dalam IRBI 2022 menetapkan skor risiko untuk Kabupaten Jepara masuk dalam kategori sedang dengan nilai skor risiko 122,27. Hal tersebut berdasarkan analisis beberapa parameter yang ditentukan oleh BNPB yaitu: tingkat ancaman/bahaya (hazard), tingkat kerentanan (vulnerability) dan tingkat kapasitas (capacity) yang di tumpang susunkan menjadi tingkat risiko.

### **1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **1.3.6.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pada Tahun 2019-2023, perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) kabupaten Jepara didominasi oleh tiga sektor lapangan usaha, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Roda perekonomian di Kabupaten Jepara digerakkan oleh ketiga pilar utama tersebut. Dinamika yang terjadi pada ketiga sektor ini akan sangat berperan dalam perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat Jepara.

Sektor Industri Pengolahan menyumbang andil terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Jepara, Selama lima tahun terakhir, kontribusi ketiga sektor ini menunjukkan trend fluktuatif. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor tersebar sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dari 34,32% pada Tahun 2022 menjadi 34,16% pada Tahun 2023. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai kontributor terbesar kedua terus menurun kontribusinya, dari 16,58% pada Tahun 2021 menjadi 16,31% pada Tahun 2023. Sedangkan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai kontributor

terbesar ketiga mengalami penurunan secara konsisten dari tahun ke tahun, dari 13,06% pada Tahun 2019 menjadi 12,38% pada Tahun 2023.

**Tabel 1.3.6.1.1.**  
**Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB 2010**  
**Tahun 2019-2023 (%)**

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13,06	13,82	13,05	12,77	12,38
2	Pertambangan dan Penggalian	1,91	1,95	1,89	1,81	1,75
3	Industri Pengolahan	34,64	34,86	35,11	34,32	34,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,1	0,11	0,11	0,1	0,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05
6	Konstruksi	7,2	7,13	7,57	7,65	7,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,76	16,21	16,58	16,37	16,31
8	Transportasi dan Pergudangan	3,77	2,77	2,73	4,19	4,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,25	4	3,94	4,29	4,45
10	Informasi dan Komunikasi	2,82	3,56	3,9	3,85	3,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,14	2,26	2,29	2,3	2,23
12	Real Estate	1,55	1,56	1,53	1,45	1,45
13	Jasa Perusahaan	0,57	0,54	0,55	0,56	0,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,24	2,23	2,09	1,94	1,96
15	Jasa Pendidikan	5,66	5,68	5,41	5,09	5,01
16	Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	1,01	1,04	1,02	0,97	0,97
17	Jasa Lainnya	2,25	2,23	2,17	2,28	2,29

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi secara sektoral dapat dilihat dari pertumbuhan sektor lapangan usaha berdasarkan PDRB ADHK. Data statistik menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi kontributor utama PDRB. Sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar terhadap PDRB meningkat hingga tahun 2023 menjadi 7.966,57 miliar rupiah. Demikian juga dengan sektor perdagangan besar dan eceran mengalami peningkatan menjadi 4.225,89 miliar rupiah pada tahun 2023; dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga mengalami peningkatan menjadi 2.759,87 miliar rupiah di tahun 2023.

Distribusi persentase PDRB ADHK menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3.6.1.2.**  
**PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Jepara**  
**Tahun 2019-2023 (miliar rupiah)**

No	Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.613,85	2.713,76	2.668,17	2.758,97	2.759,87
2	Pertambangan dan Penggalian	351,75	351,01	358,52	363,02	370,79
3	Industri Pengolahan	7.108,96	6.982,21	7.342,99	7.618,42	7.966,57
4	Pengadaan Listrik dan Gas	25,59	26,26	27,56	28,12	29,64
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	15,48	16,51	16,9	16,77	15,95
6	Konstruksi	1.445,54	1.425,36	1.561,42	1.610,83	1.749,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.827,39	3.640,97	3.897,71	4.039,18	4.225,89
8	Transportasi dan Pergudangan	966,64	687,49	695,29	1.088,97	1.174,29
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	976,2	908,11	933,33	1.072,18	1.193,96
10	Informasi dan Komunikasi	821,62	1.030,06	1.197,71	1.298,60	1.416,12
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	443,41	456,45	476,28	482,17	492,93
12	Real Estate	389,68	388,6	398,86	405,09	436,82
13	Jasa Perusahaan	122,43	114,4	122,21	128,6	137,90
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	459,73	448,89	443,8	448,28	472,52
15	Jasa Pendidikan	1.060,17	1.041,57	1.045,13	1.064,12	1.133,30
16	Jasa Kesehatan dan Kesehatan Sosial	219,06	220,53	226,76	232,12	245,37
17	Jasa Lainnya	536,79	520,91	531,6	594,42	628,09

Sumber: BPS Kabupaten Jepara, 2023

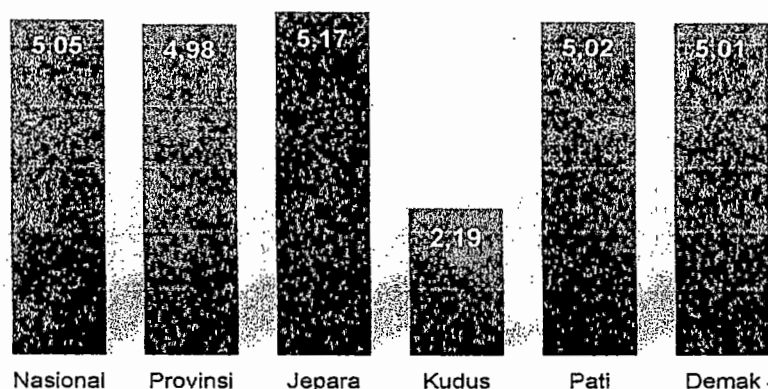
### 1.3.6.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2023, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara turun menjadi 5,17% dibandingkan Tahun 2022 yang mencapai 5,95%. Setelah melambat hingga mencapai -1,94 persen di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara memang kembali membaik hingga tahun 2022 yang mencapai 5,95%, namun kembali menurun pada tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (4,98) dan Nasional (5,05).

**Tabel 1.3.6.2.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023 (dalam %)**

Tahun	Kabupaten Jepara		Provinsi Jawa Tengah	Nasional
	Target	Realisasi		
2019	5,30-5,40	00,28	09,50	00,28
2020	5,30-5,40	-1,94	-2,65	-2,1
2021	5,40-5,50	4,63	3,32	3,7
2022	5,50-5,60	5,95	5,31	5,31
2023	5,0-6,0	5,17	4,98	5,05



Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Jepara, BPS Kudus, BPS Pati, BPS Demak, 2023

**Gambar 1.3.6.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jepara, Kabupaten di Sekitarnya, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023 (%)**

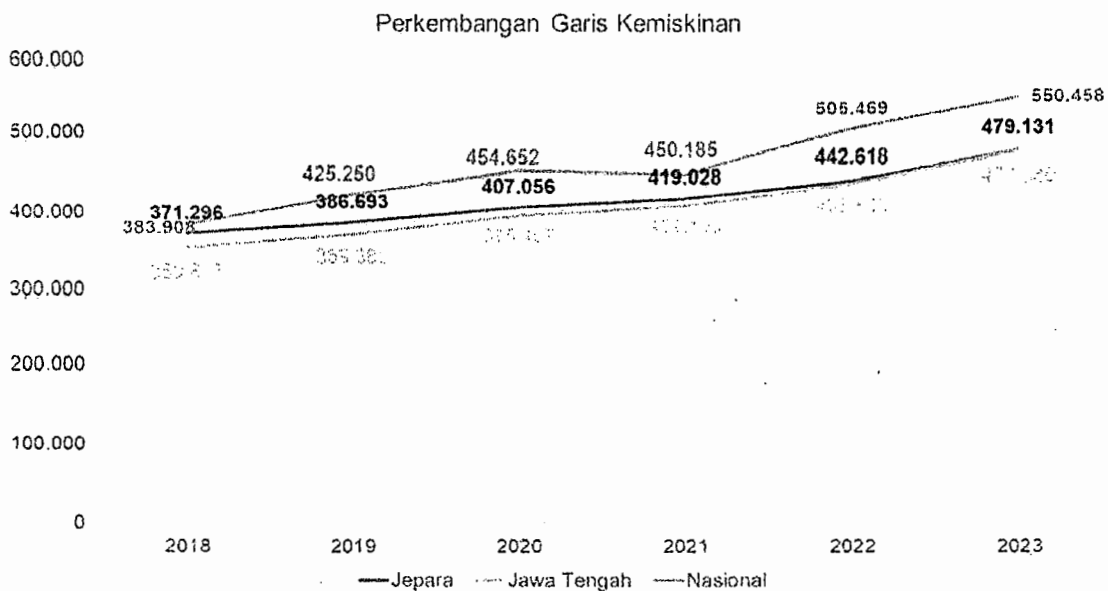
### 1.3.7. Angka Kemiskinan Daerah

Profil kemiskinan konsumsi diuraikan berdasarkan indikator garis kemiskinan, persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Adapun profil kemiskinan konsumsi digambarkan melalui uraian berikut:

#### a. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan batas yang dipergunakan untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Jepara termasuk kategori tinggi. Garis kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sudah berada diangka Rp.479.131, jauh lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah namun masih di bawah Nasional. Kenaikan garis kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi. Jika kenaikan pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan kemampuan pendapatan

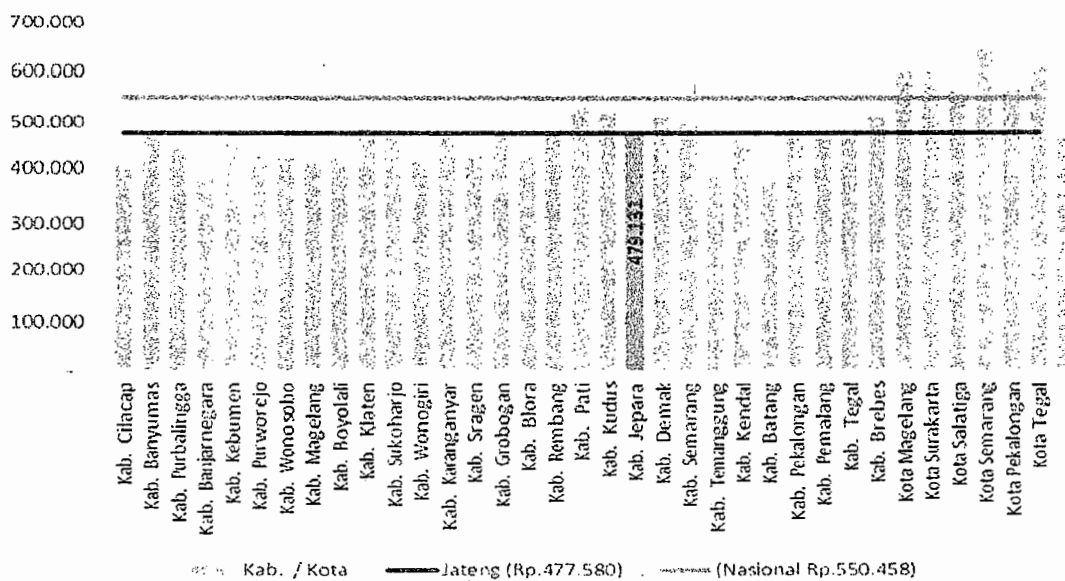
masyarakat semakin meningkat, maka penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan semakin membaik. Perkembangan besaran garis kemiskinan Kabupaten Jepara disandingkan dengan provinsi maupun nasional dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber : BPS 2023, diolah

**Gambar 1.3.7.1. Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (Rupiah/Kapita/Bulan)**

Garis kemiskinan Kabupaten Jepara pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya terlihat paling rendah. Garis kemiskinan Kabupaten Jepara sebesar Rp. 479.131, sedangkan Kabupaten Demak itu sudah mencapai Rp. 511.145 dan Kudus sebesar Rp. 520.830. Kondisi tersebut menunjukkan beban pengeluaran di Kabupaten Jepara masih lebih rendah dibandingkan di Kabupaten Kudus maupun Demak.



Sumber : BPS 2023, diolah

**Gambar 1.3.7.2. Garis Kemiskinan Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2023**

Garis kemiskinan untuk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan rilis BPS ditahun 2023 komoditas yang mendominasi ada 11 jenis, baik di Perkotaan maupun Perdesaan. Dari ke 11 komoditas tersebut, terdapat tiga komoditas yaitu mendominasi yaitu beras, rokok kretek filter dan daging ayam ras.

**Tabel 1.3.7.1.**  
**Jenis Komoditas Garis Kemiskinan Makanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	75,22	Makanan	75,84
Beras	20,00	Beras	20,87
Rokok kretek filter	11,45	Rokok kretek filter	9,43
Daging ayam ras	4,69	Daging ayam ras	3,96
Telur ayam ras	4,28	Telur ayam ras	3,86
Tempe	2,57	Tempe	2,76
Mie instan	2,48	Bawang merah	2,51
Gula pasir	2,43	Mie instan	2,47
Bawang merah	2,26	Tahu	2,43
Kue basah	2,10	Gula pasir	2,39
Roti	2,10	Cabe rawit	2,16
Komoditi makanan lainnya	20,87	Komoditi makanan lainnya	23,00

Sementara itu, untuk garis kemiskinan non makanan yang mendominasi ada 8 jenis komoditas baik di perkotaan maupun perdesaan. Dari ke 8 jenis komoditas tersebut, hanya satu yang membedakan yaitu di perkotaan pajak kendaraan bermotor, sedangkan di perdesaan belanja sabun cuci. Sementara itu, terdapat 3 komoditas yang mendominasi pada garis kemiskinan non makanan, yaitu perumahan, bensin dan listrik. Gambaran kondisi komoditas yang berpengaruh terhadap garis kemiskinan non makanan adalah sebagai berikut.

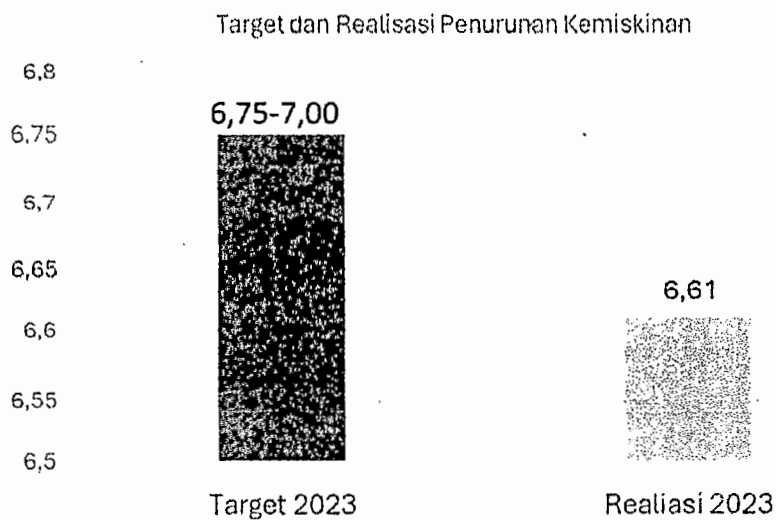
**Tabel 1.3.7.2.**  
**Jenis Komoditas Garis Kemiskinan Non Makanan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**

Jenis Komoditi	Perkotaan	Jenis Komoditi	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Bukan Makanan	24,78	Bukan Makanan	24,16
Perumahan	7,28	Perumahan	8,02
Bensin	4,33	Bensin	4,07
Listrik	2,62	Listrik	1,76
Pendidikan	1,87	Pendidikan	1,25
Perlengkapan mandi	1,28	Perlengkapan mandi	1,17
Kesehatan	0,79	Kesehatan	0,84
Pajak kendaraan bermotor	0,61	Sabun cuci	0,77
Pengeluaran bukan makanan lainnya	6,01	Pengeluaran bukan makanan lainnya	6,27

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

**b. Tingkat Kemiskinan**

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jepara pada tahun 2023 adalah sebesar 6,61 persen, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPD tahun 2023-2026 sebesar 6,75-7,00 persen, maka pencapaian angka kemiskinan ditahun 2023 mampu tercapai dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan dengan turun jauh lebih rendah.

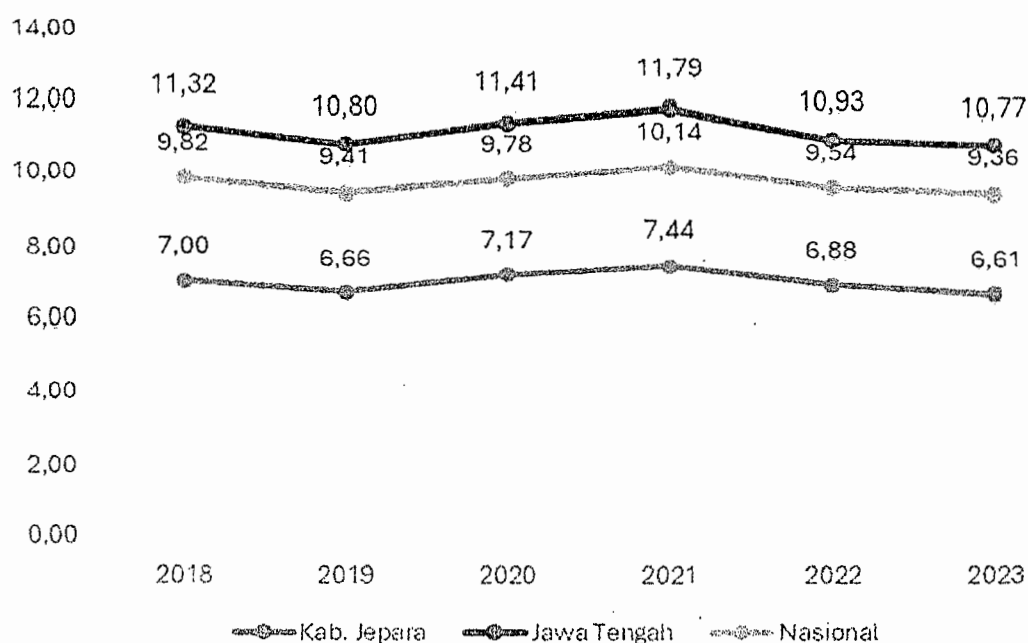


Sumber: Bappeda Jepara 2023, Diolah

**Gambar 1.3.7.3. Target Penurunan Angka Kemiskinan Berdasarkan RPD Tahun 2023-2026 Beserta Realisasinya**

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Jepara berdasarkan perkembangannya paska pandemi Covid 19 terus mengalami tren yang positif. Pada 2021, angka kemiskinan Kabupaten Jepara adalah sebesar

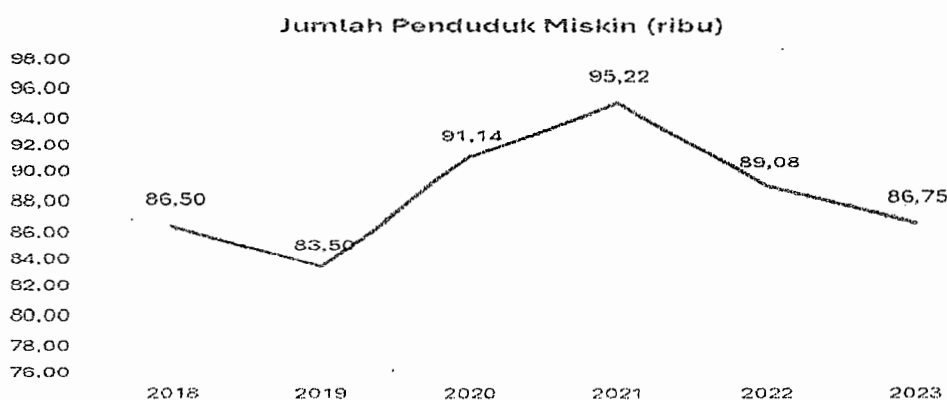
7,44% mengalami penurunan hingga 6,61% ditahun 2023. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jepara jika melihat pada Grafik 3.2, terlihat selaras dengan penurunan angka kemiskinan yang terjadi secara nasional, maupun di Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Jepara dibandingkan dengan tren kemiskinan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional dapat dilihat pada Grafik berikut.



Sumber: BPS Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional, 2024

**Gambar 1.3.7.4. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (%)**

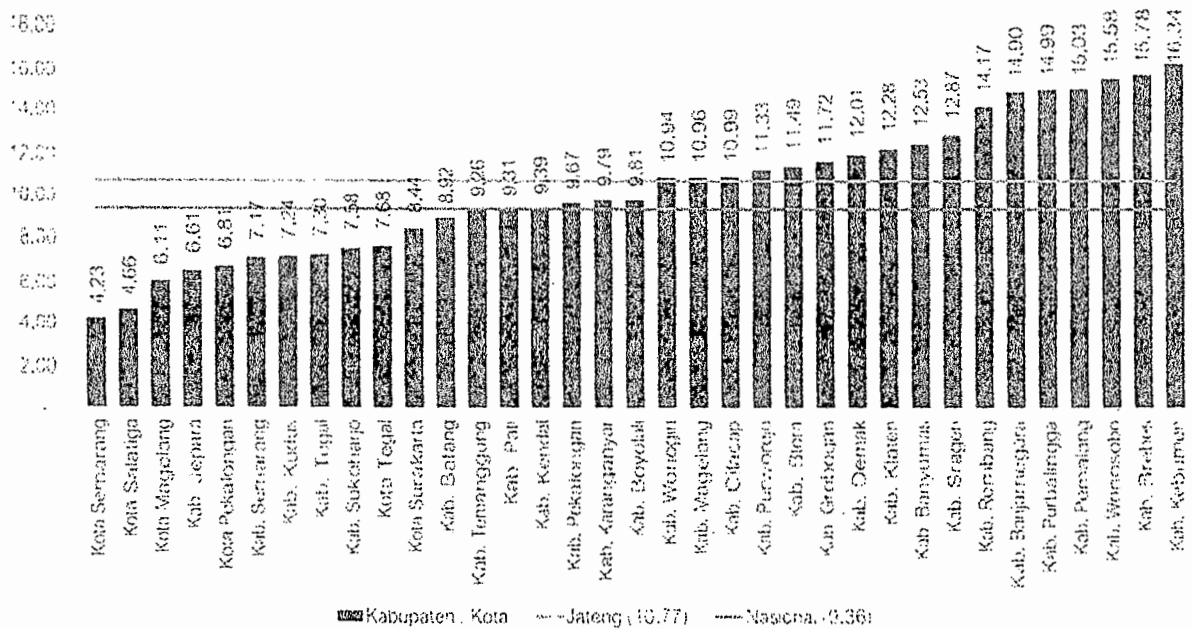
Penurunan kemiskinan di Kabupaten Jepara menjadi sebesar 6,61% juga selaras dengan penurunan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jepara dilihat dari sisi jumlah menurun dari 95,22 ribu jiwa ditahun 2021 menjadi 89,08 ribu jiwa ditahun 2022 dan 86,75 ribu jiwa ditahun 2023. Perubahan angka penduduk miskin selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS, 2024

**Gambar 1.3.7.5. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) Kabupaten Jepara Tahun 2018-2023**

Tingkat kemiskinan Kabupaten Jepara dilihat dari persentasenya merupakan angka paling rendah hampir menyamai wilayah perkotaan. Pada tahun 2023, persentase kemiskinan Kabupaten Jepara adalah sebesar 6,61%, berada pada posisi ke-4 terendah di Jawa Tengah, setelah Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kota Magelang. Perbandingan capaian persentase kemiskinan di Kabupaten Jepara secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

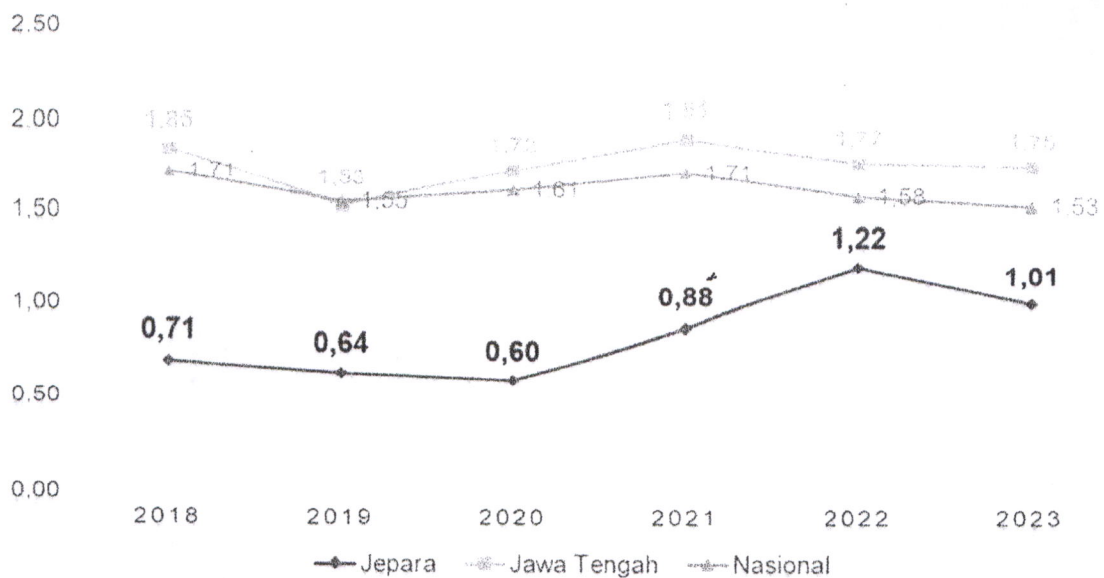


Sumber: BPS, 2020.

**Gambar 1.3.7.6. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional Tahun 2023**

### c. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

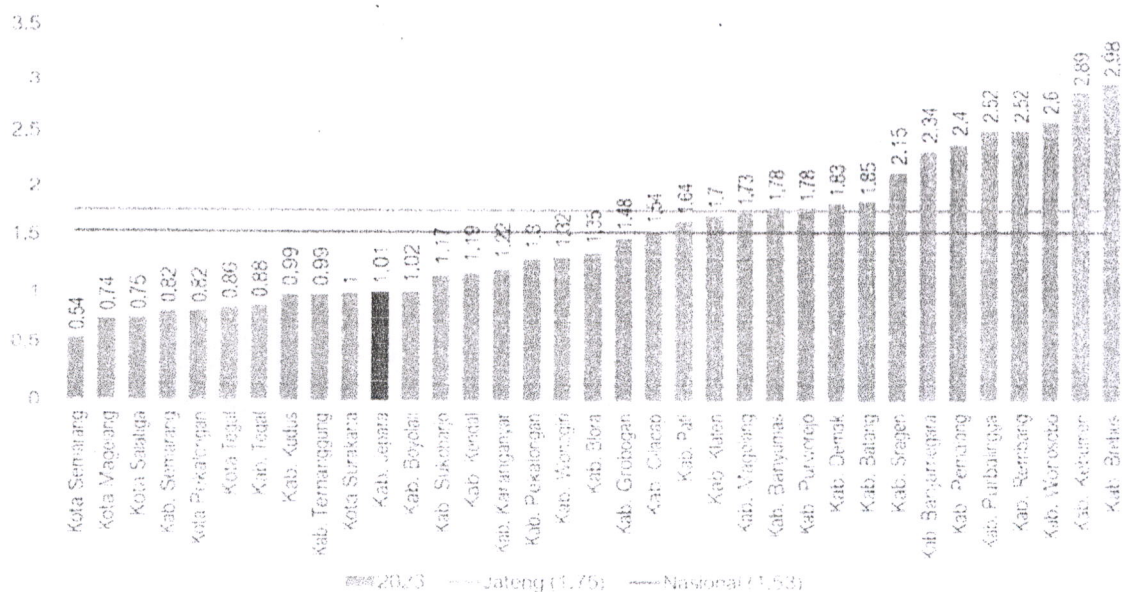
Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index - P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Jepara pada tahun 2018 hingga tahun 2023 cenderung fluktuatif yaitu pada tahun 2018 sebesar 0,64 menurun menjadi sebesar 0,60 pada tahun 2021. Namun ditahun 2022 naik menjadi 1,22 dan kembali menurun ditahun 2023 sebesar 1,01. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan memiliki kecenderungan menjauh dari garis kemiskinan ditahun 2023. Capaian perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Jepara jauh lebih baik dibanding capaian Jawa Tengah dan Nasional pada periode yang sama. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dalam lima tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, 2024

**Gambar 1.3.7.7. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023**

Capaian indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Jepara pada tahun 2023 sebesar 1,01 berada di posisi ke-11, menurun ke arah lebih baik dibandingkan posisi ditahun 2022 berada diposisi ke 18. Jika dibandingkan dengan realisasi kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara juga lebih rendah. Tercatat capaian P1 Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,75 dan Nasional sebesar 1,53 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi P1 Kabupaten Jepara. Perebandingan Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Jepara dengan Kabupaten sekitarnya dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat sebagai berikut.

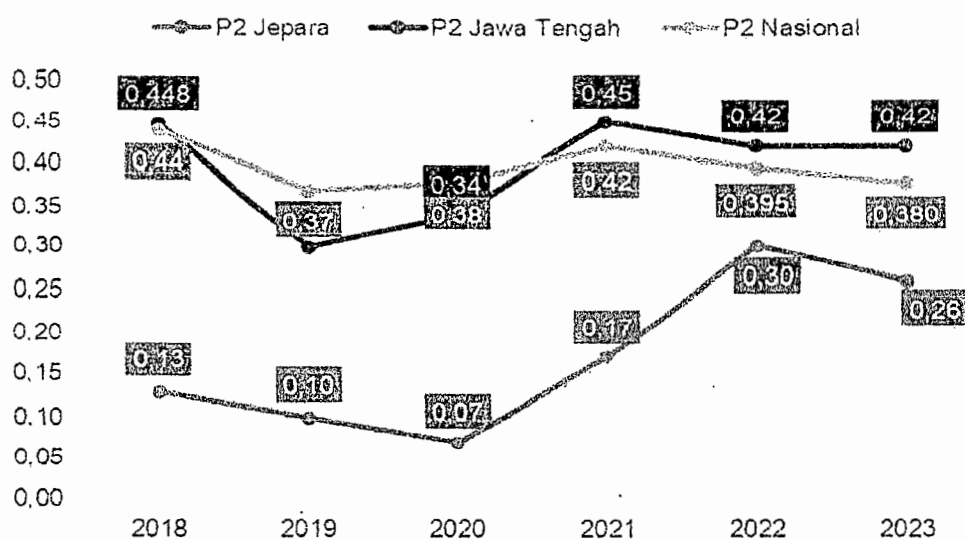


Sumber : BPS, 2024

**Gambar 1.3.7.8. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023**

#### d. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

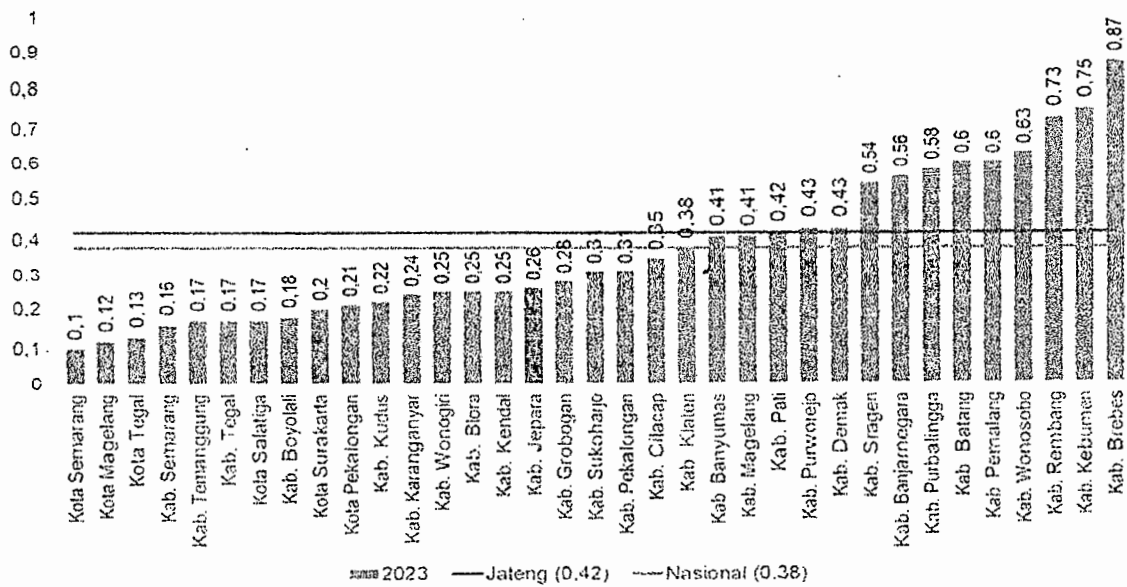
Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Indeks - P2) merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Jépara menunjukkan kondisi meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada periode tahun 2018 hingga tahun 2023 terjadi fluktuasi penurunan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Jepara, dengan kondisi ditahun 2023 menurun sebesar 0,26 dibandingkan kondisi tahun 2022 yaitu 0,30. Dibandingkan dengan perkembangan Jawa Tengah dan nasional, indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Jepara masih lebih baik. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah dan Nasional selama tahun 2018 hingga tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, 2024

**Gambar 1.3.7.9. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023**

Capaian keparahan kemiskinan di Kabupaten Jepara pada tahun 2022 menunjukkan capaian berada di posisi 16 dibandingkan dengan daerah lainnya. Jika dibandingkan dengan realisasi keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Jepara juga lebih rendah. Tercatat capaian P2 Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,42 dan Nasional sebesar 0,38. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS, 2024

**Gambar 1.3.7.10. Perkembangan Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Nasional dan Kabupaten Sekitar Tahun 2023**

#### 1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kabupaten Jepara yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

## BAB II

### KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

#### 2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Jepara Tahun 2022 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

##### 2.1.1. Bidang Pendidikan

**Tabel 2.1.1. Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Jepara Tahun 2022**

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Jepara	34.133	34.133	100 %	176.111	176.111	100 %	4.518	4.518	100 %	250.191.598.000	246.389.473.641

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.1.2. Bidang Kesehatan

**Tabel 2.1.2. Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Jepara Tahun 2022**

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Jepara	20.841	20.841	100%	18.635	18.635	100%	18.637	18.637	100%	91.862	91.862	100%	40.610	37.488	92,31%	799.047	741.567	92,81%	128.564	123.152	95,79%

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																	
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)	
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	
361.282	331.204	91,67%	30.570	30.570	100%	3.031	3.000	98,98%	5.030	5.030	100%	26.022	26.022	100%	157.685.097.000	141.118.165.492	

Sumber : Laporan SPM Daerah

### 2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

**Tabel 2.1.3. Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Jepara Tahun 2022**

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Jepara	402.129	384.405	95,59%	402.129	299.371	74,45%	27.216.947.229	25.670.454.360

Sumber : Laporan SPM Daerah

### 2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

**Tabel 2.1.4. Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Jepara Tahun 2022**

Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Jepara	34	34	100%	77	77	100%	727.000.000	727.000.000

Sumber : Laporan SPM Daerah

### 2.1.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

**Tabel 2.1.5. Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Jepara Tahun 2022**

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Jepara	2	2	100%	1.235.018	1.235.018	100%	320	320	100%	3.130	3.130	100%	80	80	100%	760.820.000	730.399.400

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.6. Bidang Sosial

**Tabel 2.1.6. Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Jepara Tahun 2022**

Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Jepara	492	492	100%	1.038	1.038	100%	102	102	100%	27	27	100%	500	450	90%	1.156.562.344	1.128.173.977

Sumber : Laporan SPM Daerah

## 2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Jepara ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

### 2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Jepara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kelengkapan data dan ketepatan waktu pelaporan</li> <li>2. Terdapat perubahan beberapa data sasaran, dimana pada awalnya data sasaran menggunakan data estimasi, sedangkan pada akhir tahun diubah menjadi angka riil.</li> <li>3. Sulitnya menghitung kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi.</li> <li>4. Tenaga pelaksana pelayanan SPM masih merangkap pekerjaan lain dan terkadang berganti-ganti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan komitmen dalam pelaporan data SPM.</li> <li>2. Adanya SK perubahan data sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun berjalan.</li> <li>3. Adanya pelatihan perhitungan kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi.</li> <li>4. Pembagian tupoksi yang jelas dan pelatihan rutin pada sumber daya yang melaksanakan SPM.</li> </ol>
II	Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada pilah anggaran spesifik untuk SPM</li> <li>2. Belum ada monitoring dan evaluasi rutin penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi anggaran spesifik untuk SPM</li> <li>2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten</li> </ol>

### 2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya kelengkapan data dan ketepatan waktu pelaporan</li> <li>2. Terdapat perubahan beberapa data sasaran, dimana pada awalnya data sasaran menggunakan data estimasi, sedangkan pada akhir tahun diubah menjadi angka riil.</li> <li>3. Sulitnya menghitung kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi.</li> <li>4. Tenaga pelaksana pelayanan SPM masih merangkap pekerjaan lain dan terkadang berganti-ganti.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan komitmen dalam pelaporan data SPM.</li> <li>2. Adanya SK perubahan data sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada akhir tahun berjalan.</li> <li>3. Adanya pelatihan perhitungan kebutuhan alokasi anggaran berdasarkan item mutu layanan dasar yang harus dipenuhi.</li> <li>4. Pembagian tupoksi yang jelas dan pelatihan rutin pada sumber daya yang melaksanakan SPM.</li> </ol>
II	Eksternal		
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada pilah anggaran spesifik untuk SPM dari anggaran BLUD</li> <li>2. Belum ada monitoring dan evaluasi rutin penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi anggaran BLUD spesifik untuk SPM</li> <li>2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala penerapan SPM dari Tim Penerapan SPM Kabupaten</li> </ol>

### 2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Jepara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Eksternal	Kurang koordinasi antar stakeholder dapat menimbulkan data yang kurang valid	Antara Stakeholder pelaksana SPM harus lebih intens dalam melaksanakan koordinasi hingga ke tingkat desa.
2	Internal	Perhitungan jumlah target yang disampaikan merupakan target pada tahun berjalan. Juga target berdasarkan jumlah KK diseluruh Kab. Jepara apabila ada penambahan KK maka target akan bertambah dan	Target yang digunakan harus dipakati oleh semua pihak.

#### 2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Jepara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN	SOLUSI
<b>I</b>	<b>INTERNAL</b>	
1	Bencana yang terjadi pada skala kecil misalnya kebakaran, rumah roboh karena angin puting beliung	dilakukan penanganan dengan menggunakan dana BTT dan bisa tuntas ditahun terjadinya bencana
<b>II</b>	<b>EKSTERNAL</b>	
1.	Belum ada mekanisme dan tata cara penetapan status bencana daerah untuk tingkat nasional, Kabupaten	Perlu adanya mekanisme dan tata cara penetapan status bencana untuk tingkat Kabupaten
2.	Perlu penyamaan indikator dan tatacara penerapan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Rakor bersama stakeholder terkait untuk merumuskan indikator dan tatacara penerapan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten
3.	Belum adanya data landbanking yang dapat digunakan sebagai tempat relokasi	Melaksanakan pendataan atau pencarian lahan yang sesuai dengan peruntukannya

#### 2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Jepara secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

No.	Sumber	Permasalahan	Solusi
1.	Internal	Cakupan wilayah manajemen kebakaran tidak sebanding dengan sarana prasarana yang tersedia	Memanfaatkan sarana prasarana penunjang pemadam kebakaran yang tersedia
2.	Internal	Keterbatasan Kapasitas SDM, Pendanaan, dan Sarana Prasarana penanggulangan bencana.	Perlu adanya kolaborasi peran Pentahelix dalam mengimplementasikan spm sub urusan bencana
3.	Internal	Belum lengkapnya data informasi dan dokumen teknis kebencanaan yang dimiliki	Perlunya menyusun dokumen teknis kebencanaan (kajian risiko bencana, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi) lengkap dengan regulasinya sebagai dokumen dasar
4.	Eksternal	Belum optimalnya keterlibatan peran masyarakat dalam penanganan Bencana dan pengurangan risiko bencana;	menyelenggarakan dan mengkampanyekan budaya sadar bencana secara masif kepada masyarakat

#### 2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Jepara berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

NO	SUMBER	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Internal	Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/PPKS dapat tertangani dikarenakan jumlahnya yang sangat besar serta beragamnya jenis PMKS.	1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor untuk penanganan PMKS lebih lanjut
			2. Peningkatan kualitas PSKS yang ada agar pelayanan dan penanganan terhadap PMKS lebih optimal
		Keterbatasan anggaran/pendanaan dan SDM yang profesional seperti Pekerja Sosial Profesional pada PMKS tertentu	Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

		<p>Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana selain sarana dan prasarana yang kurang mendukung terdapat juga aspek eksternal misalnya ada PMKS yang berasal dari luar Kota sehingga pelayanan tidak berjalan optimal</p>	<p>Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan kualitas SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS</p>
2	Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantuan alat bantu untuk disabilitas yang belum bisa mencukupi semua kategori disabilitas</li> <li>2. Bantuan pelatihan ketrampilan untuk menunjang usahadisabilitas yang masih kurang</li> </ol>	<p>Dilakukannya proses pendataan, identifikasi dan pembuatan database penyandang disabilitas untuk perencanaan mencukupi bantuan alat bantu dan menunjang pemberian bantuan pelatihan sesuai kebutuhan kategori disabilitas</p>
		<p>Data anak terlantar dalam bantuan sosial (kebutuhan dasar dan penambahan gizi) banyak yang tidak lagi memenuhi persyaratan pada tahun pencairan bantuan tersebut</p>	<p>Dilakukannya proses verifikasi dan validasi pada awal pengusulan atau pada saat data masuk untuk menjadi dasar perencanaan pencairan bantuan pada tahun dimaksud, sehingga pemberian bantuan dapat maksimal antara volume bantuan dengan jumlah valid penerima bantuan</p>

### **BAB III**

#### **STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM berikut program/ kegiatan digambarkan dalam matriks rencana aksi penerapan SPM.

### **3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi**

Untuk mencapai pemenuhan SPM, perlu diambil strategi dan kebijakan yang tepat supaya mutu dan sasaran pelayanan dalam standar pelayanan minimal dapat dipenuhi. Adapun strategi dan kebijakan pemenuhan target standar pelayanan minimal adalah sebagai berikut:

#### **1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

Strategi pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. Perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak.
2. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT.
3. Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang Berkualitas.
4. Penilaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan.
5. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan.
6. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan.
7. Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan.
8. Pengembangan kapasitas untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien.
9. Memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar.
10. Penguatan kerja sama dengan Lembaga berwenang untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata.
11. Penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
12. Peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan.

Adapun kebijakan penerapan SPM Bidang Pendidikan yang didasarkan pada strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses pelayanan PAUD
2. Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan keaksaraan

## 2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi pencapaian SPM Bidang Kesehatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan KIE kepada ibu hamil di awal terdeteksi kehamilan TM I/ibu hamil dengan resiko tinggi
2. Optimalisasi kelas ibu hamil
3. Peningkatan pelaksanaan P4K secara optimal
4. Koordinasi perencanaan sistem rujukan dengan lintas sektor
5. Sosialisasi terkait Sisrute kepada fasyankes
6. Peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti jaminan pembiayaan kesehatan dengan didukung oleh partisipasi lintas sector.
7. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan
8. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar, pelayanan kesehatan ODGJ
9. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit
10. Penguatan koordinasi antara sekolah dan puskesmas serta wali murid.
11. Mengoptimalkan promosi kesehatan
12. Penambahan jumlah posyandu lansia dan SDM kesehatan di setiap desa.
13. Pemetaan posyandu lansia dengan pendekatan lokasi strategis yang bisa dijangkau masyarakat.
14. Optimalisasi promosi kesehatan terkait penyakit Hipertensi, penyakit Diabetes Melitus dan PHBS
15. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit TBC pada kelompok beresiko (Rutan/ lapas, Ponpes, Perumahan/pemukiman padat penduduk)
16. Monitoring dan evaluasi *feedback* hasil penemuan/ pelaporan kasus kepada faskes untuk di tatalaksana Investigasi Kontak

17. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana pasien TBC dan ODHA
18. Penguatan kegiatan surveilans TBC

Adapun kebijakan penerapan SPM Bidang Kesehatan yang didasarkan pada strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif bagi Ibu Hamil
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif bagi Ibu Bersalin
3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif bagi Bayi Baru Lahir
4. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif bagi Balita
5. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif pada Usia Pendidikan Dasar
6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif pada Usia Produktif
7. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif pada Usia Lanjut
8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif pada Penderita Hipertensi
9. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif pada Penderita Diabetes Melitus
10. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif pada ODGJ Berat
11. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif pada Orang dengan Tuberkulosis
12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Komprehensif pada Orang beresiko terinfeksi HIV

3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Strategi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. Menambah capaian akses air minum layak
2. Meningkatkan akses Air limbah layak

Adapun kebijakan penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang didasarkan pada strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan air minum
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air minum sehari – hari
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

4. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan sanitasi
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air limbah sehari - hari
6. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7. mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya hygiene sanitation

#### 4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Strategi penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan Perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR
2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan Perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider
3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Perumahan
4. Pengurangan lingkungan pemukiman kumuh melalui pembangunan sarana dan prasarana lingkungan meliputi pembangunan jalan lingkungan dan drainase
5. Mengurangi jumlah rumah layak huni melalui rehabilitasi dan suplementasi pendanaan pembangunan serta peningkatan peran swasta (Corporate Social Responsibility) dan partisipasi masyarakat

Adapun kebijakan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang didasarkan pada strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial, penguatan

Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan Swadaya dan fasilitasi perumahan Khusus

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh

5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Strategi penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada
2. Memenuhi waktu tanggap darurat pelayanan kebakaran
3. Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana

Adapun kebijakan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat yang didasarkan pada strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda/Perkada
3. Peningkatan pelayanan kebakaran
4. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan kebakaran
5. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;
6. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
7. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, Peralatan dan Logistik;
8. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
9. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
10. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
11. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi penerapan SPM Bidang Sosial yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan penyandang disabilitas
2. Pengembangan program perlindungan hak anak terhadap eksploitasi fisik dan mental

3. Penguatan dan pengembangan nilai-nilai kebersamaan dan sayang kepada lansia di dalam keluarga
4. Optimaslisasi peran dan fungsi rumah singgah dalam pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis
5. Penguatan koordinasi antar instansi yang menangani korban bencana

Adapun kebijakan penerapan SPM Bidang Sosial yang didasarkan pada strategi diatas adalah sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan program pengembangan potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial
2. Memberikan bantuan dan penguatan spiritual anak secara intens
3. Mewujudkan pemberian bimbingan spiritual kepada masyarakat dan lansia
4. Memberikan pelayanan sosial yang terarah dan bermutu bagi gelandangan dan pengemis yang ada di rumah singgah
5. Bergerak cepat dalam penanganan korban bencana

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 3.1.1.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Jepara Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun</li> <li>2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun</li> <li>3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan</li> </ol>	<p>Peserta didik</p> <p>Kegiatan</p> <p>Peserta didik</p>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			3 10. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	
	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik	
				2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
				3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
				4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
				2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
				2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
				3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
				4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
				2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			3 Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

### 3.1.2.SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

### 3.1.3.SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20 Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21 Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M <sup>3</sup> /Hari
			11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /Hari
			12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/P perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

### 3.1.4.SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

### 3.1.5.SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
			4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN			
1	2	3	4	5			
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang		
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit		
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen		
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan		
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan		
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan		
		2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
					2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
	2			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
	3			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen		
	4			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit		
	5			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen		
	6			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan		
	7			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			
	8			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang		
9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen					
10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang					

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga Alam
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
			2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
			6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Dokumen
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
		Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
			2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Dokumen
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

### 3.1.6.SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Permakanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

### 3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

#### 3.2.1. Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Jepara 2023-2027

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	a. Perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD bagi seluruh anak usia 5-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. b. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT	Meningkatkan akses pelayanan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini		34.133	35.959	35.959			35.710.449.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
				Angka partisipasi sekolah	%	-	-	-	35.959	35.959	-	-	-	-
				Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	-	-	-	465	465	-	-	-	-
				Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	-	-	-	1.830	1.830	-	-	-	-
				Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	-	-	-	17	17	-	-	-	-
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-	-	-	23	23	-	-	-	-
				Indeks Distribusi Guru	%	-	-	-	3.777	3.777	-	-	-	-
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-	-	-	948	948	-	-	-	-
				Proporsi PTK penggerak	%	-	-	-	23	23	-	-	-	-
Pengalaman pelatihan guru	%	-	-	-	23	23	-	-	-	-				
2	a. Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang Berkualitas. b. Penilaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; c. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, andal, transparan dan	Pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan Dasar		176.111	186.140	186.140					APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
			b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SD		123.238	124.140	122.943			108.456.120.600			
			Angka partisipasi kasar	%	-	-	-	124140	122943	-	-	-	-	
			Angka partisipasi sekolah	%	-	-	-	124140	124140	-	-	-	-	
			Angka partisipasi murni	%	-	-	-	124140	123553	-	-	-	-	
			Kemampuan literasi	Nilai	-	-	-	73,52	73,52	-	-	-	-	
			Kemampuan numerasi	Nilai	-	-	-	58,56	58,56	-	-	-	-	
			Perbedaan skor literasi	Nilai	-	-	-	6,66	6,66	-	-	-	-	
			Perbedaan skor numerasi	Nilai	-	-	-	18,23	18,23	-	-	-	-	
Indeks iklim keamanan	Nilai	-	-	-	69,27	69,27	-	-	-	-				

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2023)					I n i s i a s i	Sumber Pendanaan	Instan si Pelaks ana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	berkesinambungan; d. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan e. Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan. f. Pengembangan kapasitas untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien; g. Memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar; h. Penguatan kerja sama dengan Lembaga berwenang untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata; i. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT			Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-	-	-	70.2 & 56.07	70.2 & 56.07	-	-	-	
Kecukupan formasi guru ASN				%	-	-	-	4.509	4.509	-	-	-		
Indeks Distribusi Guru				%	-	-	-	4509	4509	-	-	-		
Proporsi PTK bersertifikat				%	-	-	-	2.643	2.643	-	-	-		
Proporsi PTK penggerak				%	-	-	-	55	55	-	-	-		
Pengalaman pelatihan guru				%	-	-	-	4.509	4.509	-	-	-		
<b>SMP</b>					52.873	62.000	57.581			79.837.539.100	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN		
Angka partisipasi kasar				%	-	-	-	62000	57581	-	-	-		
Angka partisipasi sekolah				%	-	-	-	62000	62000	-	-	-		
Angka partisipasi murni				%	-	-	-	62000	54567	-	-	-		
Kemampuan literasi				Nilai	-	-	-	73,35	73,35	-	-	-		
Kemampuan numerasi				Nilai	-	-	-	52,80	52,80	-	-	-		
Perbedaan skor literasi				Nilai	-	-	-	9,08	9,08	-	-	-		
Perbedaan skor numerasi				Nilai	-	-	-	8,59	8,59	-	-	-		
Indeks iklim keamanan				Nilai	-	-	-	66,60	66,60	-	-	-		
Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas				Nilai	-	-	-	67.59 & 55.41	67.59 & 55.41	-	-	-		
Kecukupan formasi guru ASN				%	-	-	-	1.190	1.190	-	-	-		
Indeks Distribusi Guru				%	-	-	-	1.190	1.190	-	-	-		
Proporsi PTK bersertifikat				%	-	-	-	859	859	-	-	-		
Proporsi PTK penggerak				%	-	-	-	49	49	-	-	-		
Pengalaman pelatihan guru	%	-	-	-	1.190	1.190	-	-	-					
<b>3</b>	a. Penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) b. Peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang	Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan keaksaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>		4.518	4.797	4.797			46.961.472.000	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
Angka partisipasi kasar				%	-	-	-	4797	4797	-	-	-		
Angka partisipasi sekolah				%	-	-	-	4797	4797	-	-	-		
Angka partisipasi murni				%	-	-	-	4797	4797	-	-	-		
Kemampuan literasi				Nilai	-	-	-	36,16	36,16	-	-	-		

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2023)					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelaks ana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan;			Kemampuan numerasi	Nilai	-	-	-	33,88	33,88	-	-	-	
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-	-	-	-7,25	-7,25	-	-	-	-
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-	-	-	4,26	4,26	-	-	-	-
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-	-	-	66,07	66,07	-	-	-	-
				Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-	-	-	63,08 & 54,55	63,08 & 54,55	-	-	-	-
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-	-	-	39	39	-	-	-	-
				Indeks Distribusi Guru	%	-	-	-	39	39	-	-	-	-
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-	-	-	22	22	-	-	-	-
				Proporsi PTK penggerak	%	-	-	-	0	0	-	-	-	-
				Pengalaman pelatihan guru	%	-	-	-	39	39	-	-	-	-

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2024					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	a. Perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD bagi seluruh anak usia 5-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. b. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT	Meningkatkan akses pelayanan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini		34.133	41.954	41.954			35.710.449.000		APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN
				Angka partisipasi sekolah	%	-	-	-	41954	41954	-	-	-	-
				Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	-	-	-	41954	41954	-	-	-	-
				Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	-	-	-	545	545	-	-	-	-
				Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	-	-	-	2241	2241	-	-	-	-
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-	-	-	17	17	-	-	-	-
				Indeks Distribusi Guru	%	-	-	-	56	56	-	-	-	-
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-	-	-	3210	3210	-	-	-	-
	Proporsi PTK penggerak	%	-	-	-	913	913	-	-	-	-			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2024					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
				Pengalaman pelatihan guru	%	-	-	-	38	38	-	-	-		
2	a. Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang Berkualitas. b. Penilaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; c. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; d. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan e. Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan. f. Pengembangan kapasitas untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien; g. Memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar; h. Penguatan kerja sama dengan Lembaga berwenang untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga	Pelaksanaan wajib belajar belajar pendidikan dasar 9 tahun.	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidikan Dasar		176.111	173.983	173.983	-	-	200.472.271.930	APBD & APBN	DINAS PENDI DIKAN		
			b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	SD		123.238	117054	117054	-	-	119.933.763.110	APBD & APBN	DINAS PENDI DIKAN		
				Angka partisipasi kasar	%	-			117054	117054					
				Angka partisipasi sekolah	%	-			117054	117054					
				Angka partisipasi murni	%	-			82.93	82.93					
				Kemampuan literasi	Nilai	-			74.48	74.48					
				Kemampuan numerasi	Nilai	-			9.42	9.42					
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-			15.92	15.92					
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			73.45	73.45					
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-			74.28	74.28					
				Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			56.77	56.77					
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			4030	4030					
				Indeks Distribusi Guru	%	-			4867	4867					
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			2643	2643					
				Proporsi PTK penggerak	%	-			172	172					
				Pengalaman pelatihan guru	%	-			117054	117054					
				SMP				52.873	56929	56929			80.538.508.820	APBD & APBN	DINAS PENDI DIKAN
					Angka partisipasi kasar	%	-			56929	56929				
					Angka partisipasi sekolah	%	-			56929	56929				
					Angka partisipasi murni	%	-			77.76	77.76				
		Kemampuan literasi	Nilai	-			72.18	72.18							
		Kemampuan numerasi	Nilai	-			2.78	2.78							
		Perbedaan skor literasi	Nilai	-			19.8	19.8							
		Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			19.8	19.8							
		Indeks iklim keamanan	Nilai	-			72.98	72.98							

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2024					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	kependidikan yang merata; i. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT			Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			56.67	56.67				
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			1087	1087				
				Indeks Distribusi Guru	%	-			1871	1871				
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			859	859				
				Proporsi PTK penggerak	%	-		-	67	67				
				Pengalaman pelatihan guru	%	-		-	1.200	1.200				
3	a. Penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) b. Peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan;	Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan keaksaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>		4.518	5309	5309	-	-	47.511.472.000	-	APBD & APBN	DINAS PENDI DIKAN
				Angka partisipasi kasar	%	-	-	-	5309	5309	-	-	-	-
				Angka partisipasi sekolah	%	-	-	-	5309	5309	-	-	-	-
				Angka partisipasi murni	%	-	-	-	58.79	58.79	-	-	-	-
				Kemampuan literasi	Nilai	-	-	-	56.17	56.17	-	-	-	-
				Kemampuan numerasi	Nilai	-	-	-	0	0	-	-	-	-
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-	-	-	0	0	-	-	-	-
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-	-	-	64.81	64.81	-	-	-	-
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-	-	-	63.43	63.43	-	-	-	-
				Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-	-	-	54.32	54.32	-	-	-	-
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-	-	-	22	0	-	-	-	-
				Indeks Distribusi Guru	%	-	-	-	105	105	-	-	-	-
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-	-	-	41	41	-	-	-	-
				Proporsi PTK penggerak	%	-	-	-	21	0	-	-	-	-
				Pengalaman pelatihan guru	%	-	-	-	40	40	-	-	-	-

No.	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2025					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	a. Perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD bagi seluruh anak usia 5-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. b. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT	Meningkatkan akses pelayanan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini		34.133 (100%)	36.500	36.500			35.710.449.000		APBD / APBN	DINAS PENDI DIKAN	
				Angka partisipasi sekolah	%	-			36.500	36.500					
				Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	-			475	475					
				Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	-			1.860	1.860					
				Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	-			17	17					
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			28	28					
				Indeks Distribusi Guru	%	-			3.250	3.250					
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			970	970					
				Proporsi PTK penggerak	%	-			28	28					
				Pengalaman pelatihan guru	%	-			28	28					
2	a. Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang Berkualitas. b. Penilaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; c. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; d. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga	Pelaksanaan wajib belajar belajar pendidikan dasar 9 tahun.	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan Dasar		176.111 (100%)	185.000	185.000			202.820.238.040		APBD & APBN	DINAS PENDI DIKAN	
				SD		123.238 (100%)	124.250	124.250			121.271.763.110				
				Angka partisipasi kasar	%	-			124.250	124.250					
				Angka partisipasi sekolah	%	-			124.250	124.250					
				Angka partisipasi mumi	%	-			124.250	124.250					
				Kemampuan literasi	Nilai	-			75,00	75,00					
				Kemampuan numerasi	Nilai	-			60,00	60,00					
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-									
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-									

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2025					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	kependidikan e. Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan. f. Pengembangan kapasitas untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien; g. Memperbaiki rasio guru- murid dan memaksimalkan beban mengajar; h. Penguatan kerja sama dengan Lembaga berwenang untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata; i. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT			Indeks iklim keamanan	Nilai	-			70,50	70,50				
		Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			71,50	71,50						
		Kecukupan formasi guru ASN	%	-			4.570	4.570						
		Indeks Distribusi Guru	%	-			4.570	4.570						
		Proporsi PTK bersertifikat	%	-			2.700	2.700						
		Proporsi PTK penggerak	%	-			65	65						
		Pengalaman pelatihan guru	%	-			4.570	4.570						
		<b>SMP</b>				52.873 (100%)	60.750	60.750			81.548.474.930			
		Angka partisipasi kasar	%	-			60.750	60.750						
		Angka partisipasi sekolah	%	-			60.750	60.750						
		Angka partisipasi murni	%	-			60.750	60.750						
		Kemampuan literasi	Nilai	-			74,50	74,50						
		Kemampuan numerasi	Nilai	-			54,30	54,30						
		Perbedaan skor literasi	Nilai	-										
		Perbedaan skor numerasi	Nilai	-										
		Indeks iklim keamanan	Nilai	-			67,30	67,30						
		Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			68,20	68,20						
		Kecukupan formasi guru ASN	%	-			1.210	1.210						
		Indeks Distribusi Guru	%	-			1.210	1.210						
		Proporsi PTK bersertifikat	%	-			890	890						
	Proporsi PTK penggerak	%	-			55	55							

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2025					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Pengalaman pelatihan guru	%	-			1.210	1.210				
3	a. Penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) b. Peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan;	Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan keaksaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>		4.518 (100%)	2.300	2.300	-	-	47.511.472.000	APBD & APBN	DINAS PENDI DIKAN	
				Angka partisipasi kasar	%	-			2.300	2.300				
				Angka partisipasi sekolah	%	-			2.300	2.300				
				Angka partisipasi mumi	%	-			2.300	2.300				
				Kemampuan literasi	Nilai	-			-	-				
				Kemampuan numerasi	Nilai	-			-	-				
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-				
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-				
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-			-	-				
				Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			-	-				
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			42	42				
				Indeks Distribusi Guru	%	-			42	42				
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			27	27				
				Proporsi PTK penggerak	%	-								
				Pengalaman pelatihan guru	%	-			42	42				

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2026					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	a. Perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD bagi seluruh anak usia 5-6 tahun, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. b. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT	Meningkatkan akses pelayanan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini		34.133 (100%)	36.750	36.750			36.026.838.000		APBD / APBN	DINAS PENDI DIKAN	
				Angka partisipasi sekolah	%	-			36.750	36.750					
				Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	-			480	480					
				Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	-			1.870	1.870					
				Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	-			17	17					
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			31	31					
				Indeks Distribusi Guru	%	-			3.300	3.300					
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			990	990					
				Proporsi PTK penggerak	%	-			31	31			-		
				Pengalaman pelatihan guru	%	-			31	31			-		
2	a. Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang Berkualitas. b. Penilaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; c. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; d. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan e. Pelaksanaan Pengembangan Profesional	Pelaksanaan wajib belajar belajar pendidikan dasar 9 tahun.	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan Dasar		176.111 (100%)	185.500	185.500	-	-	202.616.876.040				
				SD		123.238 (100%)	124.500	124.500	-	-	121.298.513.110		APBD / APBN	DINAS PENDI DIKAN	
				Angka partisipasi kasar	%	-			124.500	124.500					
				Angka partisipasi sekolah	%	-			124.500	124.500					
				Angka partisipasi mumi	%	-			124.500	124.500					
				Kemampuan literasi	Nilai	-			76,00	76,00					
				Kemampuan numerasi	Nilai	-			61,00	61,00					
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-					
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-					
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-			71,50	71,50					

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2026					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan. f. Pengembangan kapasitas untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien; g. Memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar; h. Penguatan kerja sama dengan Lembaga berwenang untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata; i. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT			Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			72,50	72,50				
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			4.590	4.590				
				Indeks Distribusi Guru	%	-			4.590	4.590	-			
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			2.750	2.750	-			
				Proporsi PTK penggerak	%	-			70,00	70,00	-			
				Pengalaman pelatihan guru	%	-			4.590	4.590	-			
				<b>SMP</b>			52.873 (100%)	61.000	61.000	-	-	81.318.362.930	APBD / APBN	DINAS PENDI DIKAN
				Angka partisipasi kasar	%	-			61.000	61.000				
				Angka partisipasi sekolah	%	-			61.000	61.000				
				Angka partisipasi mumi	%	-			61.000	61.000				
				Kemampuan literasi	Nilai	-			75,50	75,50				
				Kemampuan numerasi	Nilai	-			55,30	55,30				
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-				
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-				
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-			67,80	67,80				
				Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			68,70	68,70				
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			1.220	1.220				
				Indeks Distribusi Guru	%	-			1.220	1.220				
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			910	910				
				Proporsi PTK penggerak	%	-			60	60				
			Pengalaman pelatihan guru	%	-			1.220	1.220					

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2026					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
3	a. Penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) b. Peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan pemberdayaan perempuan;	Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan keaksaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Pendidikan Kesetaraan		4.518 (100%)	2.350	2.350	-	-	47.666.272.000	-	APBD & APBN	DINAS PENDIDIKAN	
				Angka partisipasi kasar	%	-			2.350	2.350					
				Angka partisipasi sekolah	%	-			2.350	2.350					
				Angka partisipasi mumi	%	-			2.350	2.350					
				Kemampuan literasi	Nilai	-			-	-					
				Kemampuan numerasi	Nilai	-			-	-					
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-					
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-					
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-			-	-					
				Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			-	-					
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			44	44					
				Indeks Distribusi Guru	%	-			44	44					
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			29	29					
Proporsi PTK penggerak	%	-			-	-									
Pengalaman pelatihan guru	%	-			44	44									

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2027					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	a. Perluasan dan pemerataan cakupan layanan PAUD bagi seluruh anak usia 5-6 tahun, sesuai dengan	Meningkatkan akses pelayanan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pendidikan Anak Usia Dini		34.133 (100%)	37.000	37.000			36.343.227.000		APBD / APBN	DINAS PENDIDIKAN
				Angka partisipasi sekolah	%	-			37.000	37.000				

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2027					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	tahapan perkembangan anak. b. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT			Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	-			485	485				
				Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV	%	-			1.880	1.880				
				Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	-			17	17				
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			34	34				
				Indeks Distribusi Guru	%	-			3.350	3.350				
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			1010	1010				
				Proporsi PTK penggerak	%	-			34	34				
				Pengalaman pelatihan guru	%	-			34	34				
2	a. Memberikan pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang Berkualitas. b. Penilaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan; c. Pelaksanaan penilaian kinerja guru dan tenaga kependidikan yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; d. Peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dan tenaga kependidikan e. Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dan tenaga kependidikan dalam jabatan. f. Pengembangan	Pelaksanaan wajib belajar belajar pendidikan dasar 9 tahun.	a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<b>Pendidikan Dasar</b>		176.111 (100%)	185.700	185.700	-	-	203.103.850.040			
				<b>SD</b>		123.238 (100%)	124.600	124.600	-	-	121.325.263.110	APBD / APBN	DINAS PENDI DIKAN	
				Angka partisipasi kasar	%	-			124.600	124.600				
				Angka partisipasi sekolah	%	-			124.600	124.600				
				Angka partisipasi murni	%	-			124.600	124.600				
				Kemampuan literasi	Nilai	-			77,00	77,00				
				Kemampuan numerasi	Nilai	-			62,00	62,00				
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-				
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-				
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-			72,50	72,50				
				Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			73,50	73,50				
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			4.610	4.610				

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2027					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
	kapasitas untuk mengelola perekrutan, penempatan dan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien; g. Memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar; h. Penguatan kerja sama dengan Lembaga berwenang untuk menjamin mutu dan distribusi guru dan tenaga kependidikan yang merata; i. Pemberian tunjangan kesejahteraan dan fasilitas yang memadai bagi GTT/PTT			Indeks Distribusi Guru	%	-			4.610	4.610	-				
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			2.800	2.800	-				
				Proporsi PTK penggerak	%	-			75	75	-				
				Pengalaman pelatihan guru	%	-			4.610	4.610	-				
				<b>SMP</b>		52.873 (100%)	61.100	61.100	-	-	81.778.586.930		APBD / APBN	DINAS PENDI DIKAN	
				Angka partisipasi kasar	%	-			61.100	61.100					
				Angka partisipasi sekolah	%	-			61.100	61.100					
				Angka partisipasi murni	%	-			61.100	61.100					
				Kemampuan literasi	Nilai	-			76,50	76,50					
				Kemampuan numerasi	Nilai	-			56,30	56,30					
				Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-					
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-					
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-			68,30	68,30					
				Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			69,20	69,20					
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			1.230	1.230					
				Indeks Distribusi Guru	%	-			1.230	1.230					
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			930	930					
				Proporsi PTK penggerak	%	-			65	65					
Pengalaman pelatihan guru	%	-			1.230	1.230									
<b>3</b>	a. Penguatan lembaga dan satuan pendidikan nonformal, seperti: PKBM, TBM, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) b. Peningkatan layanan bagi penduduk niraksara usia dewasa yang diintegrasikan dengan program keaksaraan usaha mandiri, peningkatan budaya baca, dan pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan keaksaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>		4.518 (100%)	2.400	2.400	-	-	47.821.072.000	-	APBD & APBN	DINAS PENDI DIKAN	
				Angka partisipasi kasar	%	-			2.400	2.400					
				Angka partisipasi sekolah	%	-			2.400	2.400					
				Angka partisipasi murni	%	-			2.400	2.400					
				Kemampuan literasi	Nilai	-			-	-					
				Kemampuan numerasi	Nilai	-			-	-					

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM 2027					In is ia si	Sumber Pendanaan	Instan si Pelak sana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	pemberdayaan perempuan;			Perbedaan skor literasi	Nilai	-			-	-				
				Perbedaan skor numerasi	Nilai	-			-	-				
				Indeks iklim keamanan	Nilai	-			-	-				
				Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	-			-	-				
				Kecukupan formasi guru ASN	%	-			46	46				
				Indeks Distribusi Guru	%	-			46	46				
				Proporsi PTK bersertifikat	%	-			31	31				
				Proporsi PTK penggerak	%	-			-	-				
				Pengalaman pelatihan guru	%	-			46	46				

### 3.2.2. Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Jepara 2023-2027

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2023)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1)	1. Peningkatan KIE kepada ibu hamil di awal terdeteksi kehamilan Trimester I dan ibu hamil dengan risiko tinggi 2. Optimalisasi kelas ibu hamil 3. Peningkatan pelaksanaan K4 secara optimal	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu hamil	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		20.841	19.557	19.557			2.210.109.060
				Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	20.841			1.996	1.996	
				Tablet Tambah Darah	Tabel	20.841			19.557	19.557	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	20.841			19.557	19.557	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	20.841			19.557	19.557	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Golongan Darah	Paket	20.841			19.557	19.557	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	20.841			19.557	19.557	
				Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Paket	20.841			19.557	19.557	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20.841			19.557	19.557	
				Kunjungan 4 K	Orang	20.841			19.557	19.557	
				Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	5			313	313	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
2)	1. Koordinasi perencanaan sistem rujukan dengan lintas sektor		- Program : Program Pemenuhan Upaya	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		18.635	17.925	17.925		617.227.110	

	<p>2. Sosialisasi terkait Sisrute kepada fasyankes</p> <p>3. Peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti jaminan pembiayaan kesehatan dengan didukung oleh partisipasi lintas sektor.</p> <p>4. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan</p>	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu bersalin	<p>Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>- Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</p>	<p>Formulir Partograf</p> <p>Kartu ibu (rekam medis)</p> <p>Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)</p> <p>Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan</p> <p>Bidan</p> <p>Perawat</p>	<p>Formulir</p> <p>Paket</p> <p>Buku</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p> <p>Orang</p>	<p>18.635</p> <p>18.635</p> <p>18.635</p> <p>5</p> <p>721</p> <p>1.463</p>			<p>17.925</p> <p>17.925</p> <p>17.925</p> <p>313</p> <p>724</p> <p>1.485</p>	<p>17.925</p> <p>17.925</p> <p>17.925</p> <p>313</p> <p>724</p> <p>1.485</p>		
3)	<p>1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar</p> <p>2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan</p>	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi bayi baru lahir	<p>- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>- Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</p>	<p>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</p> <p>Vaksin Hepatitis BO</p> <p>Vitamin K1 Injeksi</p> <p>Salap/Tetes Mata Antibiotik</p> <p>Formulir Bayi Baru Lahir</p> <p>Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)</p> <p>Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)</p> <p>Dokter/dokter spesialis Anak</p> <p>Bidan</p> <p>Perawat</p>		<p>18.637</p> <p>18.637</p> <p>18.637</p> <p>18.637</p> <p>18.637</p> <p>18.637</p> <p>18.637</p> <p>7</p> <p>721</p> <p>1.463</p>	<p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>311</p> <p>724</p> <p>1.485</p>	<p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>17.905</p> <p>311</p> <p>724</p> <p>1.485</p>			351.479.410	
4)	<p>1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar</p> <p>2. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit</p>	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi balita	<p>- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>- Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan</p>	<p>Pelayanan Kesehatan Balita</p> <p>Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku</p>		<p>91.862</p> <p>91.862</p>	<p>93.257</p> <p>93.257</p>	<p>93.257</p> <p>93.257</p>			478.063.360	

untuk UKM dan UKP  
Rujukan Tingkat Daerah  
Kabupaten/Kota - Sub  
Kegiatan : Pengelolaan  
Pelayanan Kesehatan  
Balita

Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	91.862			93.257	93.257
Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	91.862			93.257	93.257
Vitamin A Biru	Kapsul	91.862			22.163	22.163
Vitamin A Merah	Kapsul	91.862			71.904	71.904
Vaksin imunisasi dasar: HBO	Vaksin	91862			93.257	93.257
Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	91862			23.314	23.314
Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin	91862			15.543	15.543
Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	91862			23.314	23.314
Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			23.314	23.314
Vaksin imunisasi dasar: Campak	Vaksin	91862			11.657	11.657
Vaksin imunisasi dasar: Rubella	Vaksin	91862			11.657	11.657
Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			23.314	23.314
Vaksin imunisasi lanjutan : Campak	Vaksin	91862			11.657	11.657
Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella	Vaksin	91862			11.657	11.657
Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	91.862			93.257	93.257
Peralatan Anafilaktik	Paket	91.862			93.257	93.257
Bidan	Orang	721			301	301
Dokter	Orang	321			724	724
Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485
Ahli Gizi	Orang	70			70	70
Guru PAUD	Orang	1.036			3.777	3.777
Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978

5)	1. Penguatan koordinasi antara sekolah dan puskesmas serta wali murid. 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia pendidikan dasar	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>		37.488	41.818	40.293		408.273.640
				Buku Raport Sehatanku	Buku	37.488			41.818	40.293
				Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	37.488			41.818	40.293
				Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	37.488			41.818	40.293
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Dokumen	37.488			41.818	40.293
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Formulir	37.488			41.818	40.293
				Dokter/Dokter gigi	Orang	79			380	380
				Bidan	Orang	721			724	724
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93
				Guru	Orang	1.578			678	678
				Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978
6)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia produktif	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		741.567	799.047	760.850		468.426.020
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	741.567			799.047	760.850
				Alat ukur berat badan	Unit	741.567			634	634
				Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit	741.567			634	634
				Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit	741.567			634	634
				Alat : Tensimeter	Unit	741.567			634	634

				Alat : Glukometer	Unit	741.567			31.962	30.434
				Alat : Tes strip gula darah	Unit	741.567			799.047	760.850
				Alat : Lancet	Unit	741.567			799.047	760.850
				Alat : Kapas alkohol	Unit	741.567			799.047	760.850
				Alat : KIT IVA Tes	Unit	741.567			799.047	760.850
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	741.567			799.047	760.850
				Dokter	Orang	321			301	301
				Bidan	Orang	721			724	724
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93
				Tenaga Non Kesehatan Terlatih	Orang	594			915	915
7)	1. Penambahan jumlah posyandu lansia dan SDM kesehatan di setiap desa. 2. Pemetaan posyandu lansia dengan pendekatan lokasi strategis yang bisa dijangkau masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia lanjut	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		123.152	148.084	143.685		
				Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	123.152			5.923	5.747
				Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	123.152			148.084	143.685
				Buku Kesehatan Lansia	Buku	123.152			148.084	143.685
				Dokter	Orang	321			301	301
				Bidan	Orang	721			724	724
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485
										332.944.735

				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Tenaga Non Kesehatan Terlatih	Orang	594			915	915	
8)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Optimalisasi promosi kesehatan terkait penyakit Hipertensi dan PHBS	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Hipertensi	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>		331.204	361.730	339.375			34.208.510
				Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	331.204			361.730	339.375	
				Tensimeter	Unit	331.204			634	634	
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	331.204			361.730	339.375	
				Obat Hipertensi	Paket	-			361.730	339.375	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
9)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Diabetes Melitus	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>		30.570	30.570	30.570			57.752.120
				Alat : Glukometer	Unit	30.570			1.223	1.223	
				Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit	30.570			30.570	30.570	
				Alat : Kapas Alkohol	Unit	30.570			30.570	30.570	
				Alat : Lancet	Unit	30.570			30.570	30.570	
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Formulir	30.570			30.570	30.570	

				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	30.570			30.570	30.570	
				Obat Diabetes Melitus	Paket	NA			30.570	30.570	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
10)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait pelayanan kesehatan ODGJ 2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada ODGJ berat	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>		3.000	2.454	2.419			182.511.405
				Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	3.000			2.454	2.419	
				Kit berisi 2 alat fiksasi	Paket	3.000			2.454	2.419	
				Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Orang	3.000			2.454	2.419	
				Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Orang	3.000			2.454	2.419	
				Dokter	Orang	5			26	26	
				Perawat terlatih jiwa	Orang	5			1	1	
				Tenaga kesehatan lainnya	Orang	5			1	1	
11)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit TBC pada kelompok berisiko (Rutan/Lapas, ponpes, perumahan/pemukiman padat	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang dengan Tuberkulosis	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>		5.030	9.020	8.900			794.936.415

	penduduk) 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil pelaporan kasus kepada faskes untuk dilakukan tatalaksana Investigasi Kontak 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana pasien TBC 4. Penguatan kegiatan surveilans TBC		Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -- Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	5.030			9.020	8.900	
				Reagen Zn TB	Paket	5.030			1.804	1.780	
				Masker jenis rumah tangga dan masker N95	Paket	5.030			9.020	8.900	
				Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5.030			9.020	8.900	
				Catridge tes cepat molekuler	Paket	5.030			9.020	8.900	
				Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	5.030			9.020	8.900	
				Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen	5.030			82	82	
				Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	11			315	315	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	159			166	166	
				Penata Rontgen	Orang	43			40	40	
				Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	90			93	93	
				Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	Orang	594			915	915	
12)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini HIV/AIDS 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil penemuan kasus 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana ODHA	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang berisiko terinfeksi HIV	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan :	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		26.022	22.994	22.994			747.262.000
				Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	26.022			22.994	22.994	

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	26.022			22.994	22.994
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	26.022			22.994	22.994
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	26.022			22.994	22.994
	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	11			408	408
	Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485
	Bidan	Orang	721			724	724
	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	159			166	166
	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	90			93	93
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	594			915	915

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1)	1. Peningkatan KIE kepada ibu hamil di awal terdeteksi kehamilan Trimester I dan ibu hamil dengan risiko tinggi 2. Optimalisasi kelas ibu hamil	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu hamil	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		20.841	19.696	19.696			2.400.000.000

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu		Anggaran
									Layanan	Realisasi	
	3. Peningkatan pelaksanaan K4 secara optimal		Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	20.841			1.970	1.970	
				Tablet Tambah Darah	Tabel	20.841			3.545.280	3.545.280	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	20.841			19.696	19.696	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	20.841			19.696	19.696	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Golongan Darah	Paket	20.841			19.696	19.696	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	20.841			2.954	2.954	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	-			19.696	19.696	
				Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Paket	20.841			19.696	19.696	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20.841			19.696	19.696	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			19.696	19.696	
				Gel USG	Botol	-			1.313	1.313	
				Kunjungan 6 K	Orang	20.841			19.696	19.696	
				Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	5			313	313	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Bidan	Orang	721			724	724	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu		Anggaran
									Layanan	Realisasi	
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Gizi	Orang	-			70	70	
2)	1. Koordinasi perencanaan sistem rujukan dengan lintas sektor 2. Sosialisasi terkait Sisrute kepada fasyankes 3. Peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti jaminan pembiayaan kesehatan dengan didukung oleh partisipasi lintas sektor. 4. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu bersalin	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>		18.635	18.800	18.800			678.700.000
				Formulir Partograf	Formulir	18.635			18.800	18.800	
				Kartu ibu (rekam medis)	Paket	18.635			18.800	18.800	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18.635			18.800	18.800	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			18.800	18.800	
				Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	5			313	313	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Gizi	Orang	-			70	70	
3)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar 2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi bayi baru lahir	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>		18.637	17.905	17.905			386.628.000
				Vaksin Hepatitis BO	Vaksin	18.637			17.905	17.905	
				Vitamin K1 Injeksi	Ampul	18.637			17.905	17.905	
				Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	18.637			17.905	17.905	
				Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	18.637			17.905	17.905	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Reallsasi	Anggaran
			- Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	18.637			17.905	17.905	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18.637			17.905	17.905	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			17.905	17.905	
				Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	7			311	311	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	-			93	93	
				Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			70	70	
				Kader Kesehatan	Orang	-			5.978	5.978	
4)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar 2. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi balita	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita		91.862	93.257	93.257			525.850.000
				Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Dokumen	91.862			93.257	93.257	
				Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	91.862			93.257	93.257	
				Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	91.862			93.257	93.257	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Vitamin A Biru	Kapsul	91.862			22.163	22.163	
				Vitamin A Merah	Kapsul	91.862			71.904	71.904	
				Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	91862			23.314	23.314	
				Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin	91862			15.543	15.543	
				Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	91862			23.314	23.314	
				Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			23.314	23.314	
				Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	Vaksin	91862			11.657	11.657	
				Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			23.314	23.314	
				Vaksin imunisasi lanjutan : Campak-Rubella	Vaksin	91862			11.657	11.657	
				Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	91.862			93.257	93.257	
				Peralatan Anafilaktik	Paket	91.862			93.257	93.257	
				Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	-			93.257	93.257	
				Dokter	Orang	321			724	724	
				Bidan	Orang	721			301	301	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Guru PAUD	Orang	1.036			3.777	3.777	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan		Anggaran
									Realisasi	Realisasi	
				Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978	
5)	1. Penguatan koordinasi antara sekolah dan puskesmas serta wali murid. 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia pendidikan dasar	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>		37.488	41.818	41.818			449.100.000
				Buku Raport Kesehatanku	Buku	37.488			41.818	41.818	
				Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	37.488			41.818	41.818	
				Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	37.488			41.818	41.818	
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Dokumen	37.488			41.818	41.818	
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Formulir	37.488			41.818	41.818	
				Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	-			14.901	14.901	
				Alat Pemeriksaan Hb	Alat	-			644	644	
				Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	-			14.901	14.901	
				Media promosi kesehatan	Paket	-			41.818	41.818	
				Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	-			5.227	5.227	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Dokter/Dokter gigi	Orang	79			380	380	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Guru	Orang	1.578			6.594	6.594	
				Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978	
6)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia produktif	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		741.567	812.187	812.187			515.268.000
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	741.567			812.187	812.187	
				Alat ukur lingkaran lengan atas (LILA)	Unit	741.567			644	644	
				Alat : Tensimeter	Unit	741.567			644	644	
				Alat : Glukometer	Unit	741.567			32.488	32.488	
				Alat: Alat Pemeriksa Hb		-			812.187	812.187	
				Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol		741.567			812.187	812.187	
				Alat : KIT IVA Tes	Unit	741.567			812.187	812.187	
				Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	-			812.187	812.187	
				Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	-			644	644	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Kuesioner PUMA	Dokumen	-			812.187	812.187	
				Alat Pelayanan KB	Unit	-			32.362	32.362	
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	741.567			812.187	812.187	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Kader	Orang	-			5.978	5.978	
7)	1. Penambahan jumlah posyandu lansia dan SDM kesehatan di setiap desa. 2. Pemetaan posyandu lansia dengan pendekatan lokasi strategis yang bisa dijangkau masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia lanjut	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		123.152	148.090	148.090			366.239.000
				Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	-			644	644	
				Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	-			644	644	
				Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	-			644	644	
				Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	123.152			6.515	6.515	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	123.152			148.090	148.090	
				Buku Kesehatan Lansia	Buku	123.152			148.090	148.090	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			148.090	148.090	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Kader	Orang	-			5.978	5.978	
8)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Optimalisasi promosi kesehatan terkait penyakit Hipertensi dan PHBS	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Hipertensi	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan :	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>		331.204	175.015	175.015			37.629.000
				Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	331.204			175.015	175.015	
				Obat Hipertensi	Paket	-			175.015	175.015	
				Tensimeter	Unit	331.204			697	697	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	331.204			175.015	175.015	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	-			93	93	
				Tanaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
9)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Diabetes Melitus	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		30.570	30.315	30.315			63.527.000
				Obat Diabetes Melitus	Paket	-			30.315	30.315	
				Alat : Glukometer	Unit	30.570			644	644	
				BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	30.570			30.315	30.315	
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Formulir	30.570			30.315	30.315	
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	30.570			30.315	30.315	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tanaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			166	166	
10)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait pelayanan kesehatan ODGJ 2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada ODGJ berat	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>		3.000	2.599	2.599			200.762.000
				Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	3.000			2.599	2.599	
				Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	-			800	800	
				Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	-			2.599	2.599	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	3.000			2.599	2.599	
				Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	3.000			2.599	2.599	
				Dokter	Orang	5			12	12	
				Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			10	10	
				Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			1	1	
11)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit TBC pada kelompok berisiko (Rutan/Lapas, ponpes, perumahan/pemukiman padat penduduk) 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil pelaporan kasus kepada faskes untuk dilakukan tatalaksana Investigasi Kontak 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana pasien TBC 4. Penguatan kegiatan surveilans TBC	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang dengan Tuberkulosis	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -- Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		5.030	14.069	14.069			874.430.000
				Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	5.030			14.069	14.069	
				Reagen Zn TB	Paket	5.030			14.069	14.069	
				Masker bedah dan masker N95	Paket	5.030			14.069	14.069	
				Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5.030			14.069	14.069	
				Catridge tes cepat molekuler	Paket	5.030			14.069	14.069	
				Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	5.030			14.069	14.069	
				Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen	5.030			90	90	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Tuberkulin	Vial	-			411	411	
				Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	11			315	315	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	159			166	166	
				Radiografer	Orang	43			40	40	
				Kader Kesehatan	Orang	-			5.978	5.978	
12)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini HIV/AIDS 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil penemuan kasus 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana ODHA	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang berisiko terinfeksi HIV	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		26.022	26.474	26.474			821.988.000
				Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	26.022			26.474	26.474	
				Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	26.022			26.474	26.474	
				Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	26.022			26.474	26.474	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	26.022			26.474	26.474	
				Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	11			318	318	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	159			166	166	
				Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	90			93	93	
				Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	594			915	915	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1)	1. Peningkatan KIE kepada ibu hamil di awal terdeteksi kehamilan Trimester I dan ibu hamil dengan risiko tinggi 2. Optimalisasi kelas ibu hamil 3. Peningkatan pelaksanaan K4 secara optimal	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu hamil	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		20.841	20.090	20.090			2.640.000.000
				Vaksin Tetanus Diferi (Td)	Ampul	20.841			2.009	2.009	
				Tablet Tambah Darah	Tabel	20.841			3.616.186	3.616.186	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	20.841			20.090	20.090	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	20.841			20.090	20.090	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Golongan Darah	Paket	20.841			20.090	20.090	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	20.841			3.013	3.013	
				Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	-			20.090	20.090	
				Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Paket	20.841			20.090	20.090	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20.841			20.090	20.090	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			20.090	20.090	
				Gel USG	Botol	-			1.339	1.339	
				Kunjungan 6 K	Orang	20.841			20.090	20.090	
Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	5			319	319					

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Perawat	Orang	1.463			1.515	1.515	
				Bidan	Orang	721			738	738	
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			394	394	
				Tenaga Gizi	Orang	-			71	71	
2)	1. Koordinasi perencanaan sistem rujukan dengan lintas sektor 2. Sosialisasi terkait Sistrute kepada fasyankes 3. Peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti jaminan pembiayaan kesehatan dengan didukung oleh partisipasi lintas sektor. 4. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu bersalin	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>		18.635	19.176	19.176			746.570.000
				Formulir Partograf	Formulir	18.635			19.176	19.176	
				Kartu ibu (rekam medis)	Paket	18.635			19.176	19.176	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18.635			19.176	19.176	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			19.176	19.176	
				Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	5			313	313	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Gizi	Orang	-			70	70	
3)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar 2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi bayi baru lahir	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>		18.637	18.263	18.263			425.290.000
				Vaksin Hepatitis BO	Vaksin	18.637			18.263	18.263	
				Vitamin K1 Injeksi	Ampul	18.637			18.263	18.263	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	18.637			18.263	18.263	
				Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	18.637			18.263	18.263	
				Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	18.637			18.263	18.263	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18.637			18.263	18.263	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			18.263	18.263	
				Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	7			311	311	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	-			93	93	
				Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			70	70	
				Kader Kesehatan	Orang	-			5.978	5.978	
4)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar 2. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi balita		- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Pelayanan Kesehatan Balita		91.862	95.122	95.122		
				Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Dokumen	91.862			95.122	95.122	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	91.862			95.122	95.122	
				Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	91.862			95.122	95.122	
				Vitamin A Biru	Kapsul	91.862			22.606	22.606	
				Vitamin A Merah	Kapsul	91.862			73.342	73.342	
									0	0	
				Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	91862			23.780	23.780	
				Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin	91862			15.854	15.854	
				Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	91862			23.780	23.780	
				Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			23.780	23.780	
				Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	Vaksin	91862			11.890	11.890	
				Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			23.780	23.780	
				Vaksin imunisasi lanjutan : Campak-Rubella	Vaksin	91862			11.890	11.890	
				Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	91.862			95.122	95.122	
				Peralatan Anafilaktik	Paket	91.862			95.122	95.122	
				Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	-			95.122	95.122	
				Dokter	Orang	321			724	724	
				Bidan	Orang	721			301	301	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Guru PAUD	Orang	1.036			3.777	3.777	
				Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978	
5)	1. Penguatan koordinasi antara sekolah dan puskesmas serta wali murid. 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia pendidikan dasar	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>		37.488	42.654	42.654			494.011.000
				Buku Raport Sehatanku	Buku	37.488			42.654	42.654	
				Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	37.488			42.654	42.654	
				Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	37.488			42.654	42.654	
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Dokumen	37.488			42.654	42.654	
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Formulir	37.488			42.654	42.654	
				Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	-			15.199	15.199	
				Alat Pemeriksaan Hb	Alat	-			657	657	
				Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	-			15.199	15.199	
				Media promosi kesehatan	Paket	-			42.654	42.654	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	-			5.332	5.332	
				Dokter/Dokter gigi	Orang	79			380	380	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Guru	Orang	1.578			6.594	6.594	
				Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978	
6)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia produktif	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		741.567	820.309	820.309			566.795.000
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	741.567			820.309	820.309	
				Alat ukur lingkaran lengan atas (LILA)	Unit	741.567			644	644	
				Alat : Tensimeter	Unit	741.567			644	644	
				Alat : Glukometer	Unit	741.567			32.813	32.813	
				Alat: Alat Pemeriksa Hb		-			820.309	820.309	
				Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol		741.567			820.309	820.309	
				Alat : KIT IVA Tes	Unit	741.567			820.309	820.309	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	-			820.309	820.309	
				Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	-			644	644	
				Kuesioner PUMA	Dokumen	-			820.309	820.309	
				Alat Pelayanan KB	Unit	-			32.686	32.686	
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	741.567			820.309	820.309	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			98	93	
				Kader	Orang	-			5.978	5.978	
7)	1. Penambahan jumlah posyandu lansia dan SDM kesehatan di setiap desa. 2. Pemetaan posyandu lansia dengan pendekatan lokasi strategis yang bisa dijangkau masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia lanjut	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		123.152	151.052	151.052			402.863.000
				Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	-			644	644	
				Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	-			644	644	
				Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	-			644	644	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			Kesehatan pada Usia Lanjut	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	123.152			6.645	6.645	
				Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	123.152			148.090	148.090	
				Buku Kesehatan Lansia	Buku	123.152			148.090	148.090	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			148.090	148.090	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Kader	Orang	-			5.978	5.978	
8)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Optimalisasi promosi kesehatan terkait penyakit Hipertensi dan PHBS	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Hipertensi		- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		331.204	176.765	176.765		
			Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)		Pedoman	331.204			176.765	176.765	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Obat Hipertensi	Paket	-			176.765	176.765	
				Tensimeter	Unit	331.204			697	697	
				Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	331.204			176.765	176.765	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	-			93	93	
				Tanaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
9)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Diabetes Melitus		- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		30.570	30.618	30.618		
			Obat Diabetes Melitus	Paket	-			30.618	30.618		
			Alat : Glukometer	Unit	30.570			644	644		
			BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	30.570			30.618	30.618		
			Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem	Formulir	30.570			30.618	30.618		

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)							
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	30.570			30.618	30.618	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tanaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			166	166	
10)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait pelayanan kesehatan ODGJ 2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada ODGJ berat	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>		3:000	2.625	2.625			220.838.800
				Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	3.000			2.625	2.625	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	-			800	800	
				Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	-			2.625	2.625	
				Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	3.000			2.625	2.625	
				Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	3.000			2.625	2.625	
				Dokter	Orang	5			12	12	
				Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			10	10	
				Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			1	1	
11)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit TBC pada kelompok berisiko (Rutan/Lapas, ponpes, perumahan/pemukiman padat penduduk) 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil pelaporan kasus kepada faskes untuk dilakukan tatalaksana Investigasi Kontak 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana pasien TBC 4. Penguatan kegiatan surveilans TBC	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang dengan Tuberkulosis	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -- Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		5.030	12.048	12.048			961.873.000
				Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	5.030			12.048	12.048	
				Reagen Zn TB	Paket	5.030			12.048	12.048	
				Masker bedah dan masker N95	Paket	5.030			12.048	12.048	
				Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5.030			12.048	12.048	
				Catridge tes cepat molekuler	Paket	5.030			12.048	12.048	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	5.030			12.048	12.048	
				Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen	5.030			12.048	12.048	
				Tuberkulin	Vial	-			352	352	
				Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	11			315	315	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	159			166	166	
				Rdiografer	Orang	43			40	40	
				Kader Kesehatan	Orang	-			5.978	5.978	
12)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini HIV/AIDS 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil penemuan kasus 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana ODHA	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang berisiko terinfeksi HIV	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		26.022	23.033	23.033			904.187.000
				Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	26.022			23.033	23.033	
				Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	26.022			23.033	23.033	
				Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sput yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	26.022			23.033	23.033	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	26.022			23.033	23.033	
				Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	11			318	318	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	159			166	166	
				Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	90			93	93	
				Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	594			915	915	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1)	1. Peningkatan KIE kepada ibu hamil di awal terdeteksi kehamilan Trimester I dan ibu hamil dengan risiko tinggi 2. Optimalisasi kelas ibu hamil 3. Peningkatan pelaksanaan K4 secara optimal	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu hamil	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		20.841	20.492	20.492			2.904.000.000
				Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	20.841			2.050	2.050	
				Tablet Tambah Darah	Tabel	20.841			3.688.509	3.688.509	
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	20.841			20.492	20.492	
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	20.841			20.492	20.492	
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Golongan Darah	Paket	20.841			20.492	20.492	
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	20.841			3.073	3.073	
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	-			20.492	20.492	
				Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Paket	20.841			20.492	20.492	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20.841			20.492	20.492	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			20.492	20.492	
				Gel USG	Botol	-			1.366	1.366	
				Kunjungan 6 K	Orang	20.841			20.492	20.492	
				Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	5			326	326	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Perawat	Orang	1.463			1.545	1.545	
				Bidan	Orang	721			753	753	
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			402	402	
				Tenaga Gizi	Orang	-			73	73	
2)	1. Koordinasi perencanaan sistem rujukan dengan lintas sektor 2. Sosialisasi terkait Sistrute kepada fasyankes 3. Peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti jaminan pembiayaan kesehatan dengan didukung oleh partisipasi lintas sektor. 4. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu bersalin	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	<b>Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin</b>		18.635	19.560	19.560			821.227.000
				Formulir Partograf	Formulir	18.635			19.560	19.560	
				Kartu ibu (rekam medis)	Paket	18.635			19.560	19.560	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18.635			19.560	19.560	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			19.560	19.560	
				Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	5			313	313	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Gizi	Orang	-			70	70	
3)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar 2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi bayi baru lahir	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>		18.637	18.628	18.628			467.819.000
				Vaksin Hepatitis BO	Vaksin	18.637			18.628	18.628	
				Vitamin K1 Injeksi	Ampul	18.637			18.628	18.628	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	18.637			18.628	18.628	
				Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	18.637			18.628	18.628	
				Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	18.637			18.628	18.628	
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18.637			18.628	18.628	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			18.628	18.628	
				Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	7			311	311	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	-			93	93	
				Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	-			70	70	
				Kader Kesehatan	Orang	-			5.978	5.978	
4)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar 2. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi balita	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk	<b>Pelayanan Kesehatan Balita</b>		91.862	97.025	97.025			636.278.000
				Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Dokumen	91.862			97.025	97.025	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				Anggaran
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	
			UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	91.862			97.025	97.025	
				Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	91.862			97.025	97.025	
				Vitamin A Biru	Kapsul	91.862			23.058	23.058	
				Vitamin A Merah	Kapsul	91.862			74.809	74.809	
									0	0	
				Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	91862			24.256	24.256	
				Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin	91862			16.171	16.171	
				Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	91862			24.256	24.256	
				Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			24.256	24.256	
				Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	Vaksin	91862			12.128	12.128	
				Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			24.256	24.256	
				Vaksin imunisasi lanjutan : Campak-Rubella	Vaksin	91862			12.128	12.128	
				Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	91.862			97.025	97.025	
				Peralatan Anafilaktik	Paket	91.862			97.025	97.025	
				Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	-			97.025	97.025	
				Dokter	Orang	321			724	724	
			Bidan	Orang	721			301	301		

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Guru PAUD	Orang	1.036			3.777	3.777	
				Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978	
5)	1. Penguatan koordinasi antara sekolah dan puskesmas serta wali murid. 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan -	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia pendidikan dasar	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>		37.488	43.507	43.507			543.412.000
				Buku Raport Kesehatanku	Buku	37.488			43.507	43.507	
				Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	37.488			43.507	43.507	
				Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	37.488			43.507	43.507	
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	Dokumen	37.488			43.507	43.507	
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Formulir	37.488			43.507	43.507	
				Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	-			15.503	15.503	
				Alat Pemeriksaan Hb	Alat	-			670	670	
				Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	-			15.503	15.503	
				Media promosi kesehatan	Paket	-			43.507	43.507	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	-			5.438	5.438	
				Dokter/Dokter gigi	Orang	79			380	380	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Guru	Orang	1.578			6.594	6.594	
				Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978	
6)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia produktif	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		741.567	828.512	828.512			623.475.000
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	741.567			828.512	828.512	
				Alat ukur lingkaran lengan atas (LILA)	Unit	741.567			644	644	
				Alat : Tensimeter	Unit	741.567			644	644	
				Alat : Glukometer	Unit	741.567			33.141	33.141	
				Alat: Alat Pemeriksa Hb		-			828.512	828.512	
				Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol		741.567			828.512	828.512	
				Alat : KIT IVA Tes	Unit	741.567			828.512	828.512	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	-			828.512	828.512	
				Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	-			644	644	
				Kuesioner PUMA	Dokumen	-			828.512	828.512	
				Alat Pelayanan KB	Unit	-			33.012	33.012	
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	741.567			828.512	828.512	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Kader	Orang	-			5.978	5.978	
7)	1. Penambahan jumlah posyandu lansia dan SDM kesehatan di setiap desa. 2. Pemetaan posyandu lansia dengan pendekatan lokasi strategis yang bisa dijangkau masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia lanjut	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		123.152	154.073	154.073			443.149.000
				Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter.	Paket	-			644	644	
				Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	-			644	644	
				Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	-			644	644	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			Kesehatan pada Usia Lanjut	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	123.152			6.778	6.778	
				Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	123.152			148.090	148.090	
				Buku Kesehatan Lansia	Buku	123.152			148.090	148.090	
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			148.090	148.090	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Kader	Orang	-			5.978	5.978	
8)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Optimalisasi promosi kesehatan terkait penyakit Hipertensi dan PHBS	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Hipertensi	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		331.204	178.533	178.533			45.531.000
				Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	331.204			178.533	178.533	
				Obat Hipertensi	Paket	-			178.533	178.533	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
			Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tensimeter	Unit	331.204			697	697	
				Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	331.204			178.533	178.533	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	-			93	93	
				Tanaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
9)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Diabetes Melitus	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		30.570	30.924	30.924			76.868.000
				Obat Diabetes Melitus	Paket	-			30.924	30.924	
				Alat : Glukometer	Unit	30.570			644	644	
				BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	30.570			30.924	30.924	
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Formulir	30.570			30.924	30.924	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	30.570			30.924	30.924	
				Dokter	Orang	321			301	301	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Tanaga Kefarmasian	Orang	-			386	386	
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93	
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70	
				Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			166	166	
10)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait pelayanan kesehatan ODGJ 2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada ODGJ berat	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat</b>		3.000	2.651	2.651			242.922.000
				Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	3.000			2.651	2.651	
				Penyediaan Psikofarmaka	Genus	-			800	800	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	-			2.651	2.651	
				Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	3.000			2.651	2.651	
				Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	3.000			2.651	2.651	
				Dokter	Orang	5			12	12	
				Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			10	10	
				Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			1	1	
11)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit TBC pada kelompok berisiko (Rutan/Lapas, ponpes, perumahan/pemukiman padat penduduk) 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil pelaporan kasus kepada faskes untuk dilakukan tatalaksana Investigasi Kontak 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana pasien TBC 4. Penguatan kegiatan surveilans TBC	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang dengan Tuberkulosis	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota -- Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		5.030	10.379	10.379			1.058.060.000
				Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	5.030			10.379	10.379	
				Reagen Zn TB	Paket	5.030			10.379	10.379	
				Masker bedah dan masker N95	Paket	5.030			10.379	10.379	
				Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5.030			10.379	10.379	
				Catridge tes cepat molekuler	Paket	5.030			10.379	10.379	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	5.030			10.379	10.379	
				Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen	5.030			10.379	10.379	
				Tuberkulin	Vial	-			303	303	
				Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	11			315	315	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	159			166	166	
				Radiografer	Orang	43			40	40	
				Kader Kesehatan	Orang	-			5.978	5.978	
12)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini HIV/AIDS 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil penemuan kasus 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana ODHA	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang berisiko terinfeksi HIV	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		26.022	23.554	23.554			994.605.000
				Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	26.022			23.554	23.554	
				Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	26.022			23.554	23.554	
				Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	26.022			23.554	23.554	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)				
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
				Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	26.022			23.554	23.554	
				Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	11			318	318	
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485	
				Bidan	Orang	721			724	724	
				Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	159			166	166	
				Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	90			93	93	
				Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	594			915	915	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1)	1. Peningkatan KIE kepada ibu hamil di awal terdeteksi kehamilan Trimester I dan ibu hamil dengan risiko tinggi 2. Optimalisasi kelas ibu hamil 3. Peningkatan pelaksanaan K4 secara optimal	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu hamil	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		20.841	20.902	20.902			3.194.400.000		APBD, DAK, BLUD	Dinkes
				Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	20.841			2.091	2.091				
				Tablet Tambah Darah	Tabel	20.841			3.762.279	3.762.279				
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket	20.841			20.902	20.902				
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	20.841			20.902	20.902				
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Golongan Darah	Paket	20.841			20.902	20.902				
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	Paket	20.841			3.135	3.135				
				Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	-			20.902	20.902				
				Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Paket	20.841			20.902	20.902				
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	20.841			20.902	20.902				
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			20.902	20.902				
				Gel USG	Botol	-			1.393	1.393				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Kunjungan 6 K	Orang	20.841			20.902	20.902				
				Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang	5			332	332				
				Perawat	Orang	1.463			1.576	1.576				
				Bidan	Orang	721			768	768				
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			410	410				
				Tenaga Gizi	Orang	-			74	74				
2)	1. Koordinasi perencanaan sistem rujukan dengan lintas sektor 2. Sosialisasi terkait Sistrute kepada fasyankes 3. Peningkatan edukasi kepada masyarakat untuk mengikuti jaminan pembiayaan kesehatan dengan didukung oleh partisipasi lintas sektor. 4. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi ibu bersalin	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		18.635	19.951	19.951			903.349.000		APBD, DAK, BLUD	
				Formulir Partograf	Formulir	18.635			19.951	19.951				
				Kartu ibu (rekam medis)	Paket	18.635			19.951	19.951				
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18.635			19.951	19.951				
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			19.951	19.951				
				Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	Orang	5			313	313				
				Bidan	Orang	721			724	724				
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485				
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Tenaga Gizi	Orang	-			70	70				
3)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar 2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi bayi baru lahir	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	<b>Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>		18.637	19.001	19.001			514.601.000		APBD, BLUD	
				Vaksin Hepatitis BO	Vaksin	18.637			19.001	19.001				
				Vitamin K1 Injeksi	Ampul	18.637			19.001	19.001				
				Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang	18.637			19.001	19.001				
				Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir	18.637			19.001	19.001				
				Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang	18.637			19.001	19.001				
				Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	18.637			19.001	19.001				
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			19.001	19.001				
				Dokter/dokter spesialis Anak	Orang	7			311	311				
				Bidan	Orang	721			724	724				
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485				
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386				
				Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	-			93	93				
				Tenaga Gizi	Orang	-			70	70				
				Kader Kesehatan	Orang	-			5.978	5.978				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
4)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait imunisasi dasar 2. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif bagi balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>- Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>- Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</li> </ul>	Pelayanan Kesehatan Balita		91.862	98.965	98.965			699.906.000		APBD, DAK, BLUD		
				Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Dokumen	91.862			98.965	98.965					
				Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	91.862			98.965	98.965					
				Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	91.862			98.965	98.965					
				Vitamin A Biru	Kapsul	91.862			23.520	23.520					
				Vitamin A Merah	Kapsul	91.862			76.305	76.305					
									0	0					
				Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	91862			24.741	24.741					
				Vaksin imunisasi dasar: Polio	Vaksin	91862			16.494	16.494					
				Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	91862			24.741	24.741					
				Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			24.741	24.741					
				Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubella	Vaksin	91862			12.371	12.371					
				Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	91862			24.741	24.741					

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Vaksin imunisasi lanjutan : Campak-Rubella	Vaksin	91862			12.371	12.371				
				Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	91.862			98.965	98.965				
				Peralatan Anafilaktik	Paket	91.862			98.965	98.965				
				Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	-			98.965	98.965				
				Dokter	Orang	321			724	724				
				Bidan	Orang	721			301	301				
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485				
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70				
				Guru PAUD	Orang	1.036			3.777	3.777				
				Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978				
5)	1. Penguatan koordinasi antara sekolah dan puskesmas serta wali murid. 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia pendidikan dasar	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>		37.488	44.378	44.378			597.753.000		APBD, DAK, BLUD	
				Buku Raport Sehatanku	Buku	37.488			44.378	44.378				
				Buku Pemantauan Kesehatan	Buku	37.488			44.378	44.378				
				Kuesioner Skrining Kesehatan	Dokumen	37.488			44.378	44.378				
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan	Dokumen	37.488			44.378	44.378				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Remaja di Dalam Sekolah										
				Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	Formulir	37.488			44.378	44.378				
				Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	Tablet	-			15.813	15.813				
				Alat Pemeriksaan Hb	Alat	-			683	683				
				Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	-			15.813	15.813				
				Media promosi kesehatan	Paket	-			44.378	44.378				
				Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	-			5.547	5.547				
				Dokter/Dokter gigi	Orang	79			380	380				
				Bidan	Orang	721			724	724				
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485				
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70				
				Tenaga Kefarmasian	Orang	-			386	386				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93				
				Guru	Orang	1.578			6.594	6.594				
				Kader Kesehatan	Orang	4.137			5.978	5.978				
6)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Mengoptimalkan promosi kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia produktif	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>		741.567	836.797	836.797			685.822.000		APBD, DAK, BLUD	
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	741.567			836.797	836.797				
				Alat ukur lingkaran lengan atas (LILA)	Unit	741.567			644	644				
				Alat : Tensimeter	Unit	741.567			644	644				
				Alat : Glukometer	Unit	741.567			33.472	33.472				
				Alat: Alat Pemeriksa Hb		-			836.797	836.797				
				Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol		741.567			836.797	836.797				
				Alat : KIT IVA Tes	Unit	741.567			836.797	836.797				
				Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	-			836.797	836.797				
				Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	-			644	644				
				Kuesioner PUMA	Dokumen	-			836.797	836.797				
				Alat Pelayanan KB	Unit	-			33.343	33.343				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	741.567			836.797	836.797				
				Dokter	Orang	321			301	301				
				Bidan	Orang	721			724	724				
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485				
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70				
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93				
				Kader	Orang	-			5.978	5.978				
7)	1. Penambahan jumlah posyandu lansia dan SDM kesehatan di setiap desa. 2. Pemetaan posyandu lansia dengan pendekatan lokasi strategis yang bisa dijangkau masyarakat.	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada usia lanjut	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>		123.152	157.154	157.154			487.464.000		APBD, DAK, BLUD	
				Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	-			644	644				
				Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	-			644	644				
				Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	-			644	644				
				Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	Paket	123.152			6.914	6.914				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	Paket	123.152			148.090	148.090				
				Buku Kesehatan Lansia	Buku	123.152			148.090	148.090				
				Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	-			148.090	148.090				
				Dokter	Orang	321			301	301				
				Bidan	Orang	721			724	724				
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485				
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70				
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93				
				Kader	Orang	-			5.978	5.978				
8)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit 2. Optimalisasi promosi kesehatan terkait penyakit Hipertensi dan PHBS	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Hipertensi	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		331.204	180.318	180.318			50.084.000		APBD, BLUD	
				Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi,	Pedoman	331.204			180.318	180.318				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Informasi, Edukasi (KIE)										
				Obat Hipertensi	Paket	-				180.318	180.318			
				Tensimeter	Unit	331.204				697	697			
				Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	331.204				180.318	180.318			
				Dokter	Orang	321				301	301			
				Bidan	Orang	721				724	724			
				Perawat	Orang	1.463				1.485	1.485			
				Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	-				93	93			
				Tanaga Kefarmasian	Orang	-				386	386			
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90				93	93			
9)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada penderita Diabetes Melitus	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		30.570	31.234	31.234			84.554.000		APBD, DAK, BLUD	
				Obat Diabetes Melitus	Paket	-			31.234	31.234				
				Alat : Glukometer	Unit	30.570			644	644				
				BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar	Unit	30.570			31.234	31.234				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Reallsasi	Anggaran				
			Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet											
				Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Formulir	30.570			31.234	31.234					
				Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	30.570			31.234	31.234					
				Dokter	Orang	321			301	301					
				Bidan	Orang	721			724	724					
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485					
				Tanaga Kefarmasian	Orang	-			386	386					
				Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	90			93	93					
				Ahli Gizi	Orang	70			70	70					
				Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			166	166					

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
10)	1. Peningkatan KIE dan sosialisasi terkait pelayanan kesehatan ODGJ 2. Pemenuhan SDM Tenaga Kesehatan untuk memenuhi kurangnya kebutuhan tenaga kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan kesehatan komprehensif pada ODGJ berat	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		3.000	2.678	2.678			267.214.000		APBD, DAK, BLUD	
				Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	3.000			2.678	2.678				
				Penyediaan Psikofarmaka	Jenis	-			800	800				
				Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	-			2.678	2.678				
				Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	3.000			2.678	2.678				
				Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	3.000			2.678	2.678				
				Dokter	Orang	5			12	12				
				Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			10	10				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	-			1	1				
11)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini penyakit TBC pada kelompok berisiko (Rutan/Lapas, ponpes, perumahan/pemukiman padat penduduk) 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil pelaporan kasus kepada faskes untuk dilakukan tatalaksana Investigasi Kontak 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana pasien TBC 4. Penguatan kegiatan surveilans TBC	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang dengan Tuberkulosis	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>		5.030	9.860	9.860			1.163.866.000	APBD, DAK, BLUD		
				Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Media	5.030			9.860	9.860				
				Reagen Zn TB	Paket	5.030			9.860	9.860				
				Masker bedah dan masker N95	Paket	5.030			9.860	9.860				
				Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	5.030			9.860	9.860				
				Catridge tes cepat molekuler	Paket	5.030			9.860	9.860				
				Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	5.030			9.860	9.860				
				Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen	5.030			9.860	9.860				
				Tuberkulin	Vial	-			288	288				
				Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	11			315	315				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485				
				Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	159			166	166				
				Rdiografer	Orang	43			40	40				
				Kader Kesehatan	Orang	-			5.978	5.978				
12)	1. Penguatan skrining dan deteksi dini HIV/AIDS 2. Monitoring dan evaluasi feedback hasil penemuan kasus 3. Advokasi dan penguatan program kepada pemangku kebijakan untuk membantu dalam tatalaksana ODHA	Peningkatan pelayanan kesehatan komprehensif pada orang berisiko terinfeksi HIV	- Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)</b>		26.022	24.088	24.088			1.064.066.000		APBD, DAK, BLUD	
				Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	26.022			24.088	24.088				
				Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	26.022			24.088	24.088				
				Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	26.022			24.088	24.088				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	26.022			24.088	24.088				
				Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	11			318	318				
				Perawat	Orang	1.463			1.485	1.485				
				Bidan	Orang	721			724	724				
				Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	159			166	166				
				Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	90			93	93				
				Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	594			915	915				

### 3.2.3. Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara 2023-2027

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1.1	Menambah capaian akses air minum layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan air minum	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Kegiatan Peningkatan Akses Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	384.405	386.774	386.774			14.098.539.000	APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR	
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air minum sehari - hari		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambung an Rumah/ SR	82.178			84.547	84.547	14.098.539.000	APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR	
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	82.178			84.547	84.547	14.098.539.000	APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR	
3				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	302.227			302.227	302.227	-	-	DPUPR	
4				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	302.227			302.227	302.227	-	-	DPUPR	
2.2	- Meningkatkan akses Air limbah layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan sanitasi	- Program Pengelolaan dan	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR	KK/SR	299.371	300.634	300.634			14.475.830.000	APBD, BANPROV,	DPUPR	

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota									HIBAH APBN, DAK		
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air limbah sehari - hari		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	299.371			300.634	300.634	14.475.830.000		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	299.371			300.634	300.634	14.475.830.000		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
3		4. mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya <i>hiegine sanitation</i>		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	-			-	-	-		-	DPUPR
4				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	300			-	-	-		-	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
5				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga									DPUPR
6				Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	Rumah Tangga	6.917				8.180	14.475.830.000		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2024					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
1.1	Menambah capaian akses air minum layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan air minum	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	384.405	387.260	387.260			18.501.169.500		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air minum sehari - hari	- Kegiatan Peningkatan Akses Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambung an Rumah/S R	82.178			85.033	85.033	18.501.169.500		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	82.178			85.033	85.033	18.501.169.500		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
3				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	302.227			302.227	302.227	-		-	DPUPR
4				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	302.227			302.227	302.227	-		-	DPUPR
2.2	- Meningkatkan akses Air limbah layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan sanitasi	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR</b>	KK/SR	299.371	300.819	300.819			9.784.014.900		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air limbah sehari - hari	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	299.371			300.819	300.819	9.784.014.900		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan	Rumah Tangga	299.371			300.819	300.819	9.784.014.900		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2024					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
				kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)										
3		4. mensosialisasikan kepara masyarakat pentingnya <i>hieGINE sanitation</i>		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	-			-	-	-	-	DPUPR	
4			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	300			-	-	-	-	-	DPUPR	
5			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	-			-	-	-	-	-	DPUPR	
6			Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	Rumah Tangga	6.917				300.819	300.819	9.784.014.900		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
1.1	Menambah capaian akses air minum layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan air minum	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<b>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR</b>	KK/SR	384.405	389.529	389.529			20.351.286.450		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air minum sehari - hari	- Kegiatan Peningkatan Akses Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	82.178			87.302	87.302	20.351.286.450		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	82.178			87.302	87.302	20.351.286.450		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
3				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	302.227			302.227	302.227	-		-	DPUPR
4				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	302.227			302.227	302.227	-		-	DPUPR
2.2	- Meningkatkan akses Air limbah layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan sanitasi	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR</b>	KK/SR	299.371	301.020	301.020			11.762.416.390		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air limbah sehari - hari	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	299.371			301.020	301.020	11.762.416.390		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	299.371			301.020	301.020	11.762.416.390		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
3		4. mensosialisasikan kepara masyarakat pentingnya <i>hieGINE sanitation</i>		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	-			-	-	-		-	DPUPR
4				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	300			-	-	-		-	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
5				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	-								DPUPR
6				Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	Rumah Tangga	6.917			301.020	301.020	11.762.416.390		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
1.1	Menambah capaian akses air minum layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan air minum	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR	KK/SR	384.405	388.266	388.266			22.386.415.095		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air minum sehari - hari	- Kegiatan Peningkatan Akses Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambung an Rumah/S R	82.178			388.266	388.266	22.386.415.095		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak	Rumah Tangga	82.178			388.266	388.266	22.386.415.095		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				berasa, tidak berbusa, tidak berbau)										
3				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	302.227			302.227	302.227	22.386.415.095		-	DPUPR
4				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	302.227			302.227	302.227	22.386.415.095		-	DPUPR
2.2	- Meningkatkan akses Air limbah layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan sanitasi	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR</b>	KK/SR	299.371	301.221	301.221			12.938.658.029		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air limbah sehari - hari	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	299.371			301.221	301.221	12.938.658.029		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	299.371			301.221	301.221	12.938.658.029		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
3		4. mensosialisasikan kepara masyarakat pentingnya <i>hiegiene sanitation</i>		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses	Rumah Tangga	-			-	-	-		-	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
				aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)										
4				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	300			-	-	-		-	DPUPR
5				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	-			-	-	-		-	DPUPR
6				Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	Rumah Tangga	6.917			301.221	301.221	12.938.658.029		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
1.1	Menambah capaian akses air minum layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan air minum	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Kegiatan Peningkatan Akses Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<b>Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari - Satuan KK/SR</b>	KK/SR	384.405	388.266	388.266			22.386.415.095		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air minum sehari - hari		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Sambungan Rumah/SR	82.178			388.266	388.266	22.386.415.095		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	82.178			388.266	388.266	22.386.415.095		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
3				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	Rumah Tangga	302.227			DPUPR	DPUPR	22.386.415.095		-	DPUPR
4				Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	Rumah Tangga	302.227			DPUPR	DPUPR	22.386.415.095		-	DPUPR
2.2	- Meningkatkan akses Air limbah layak	1. Optimalisasi proses perencanaan pada kegiatan sanitasi	- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	<b>Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR</b>	KK/SR	299.371	301.221				12.938.658.029		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
1		2. Melakukan monitoring dan evaluasi pada kegiatan pemenuhan air limbah sehari - hari	- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	299.371			301.221	301.221	12.938.658.029		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
2		3. Mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	Rumah Tangga	299.371			301.221	301.221	12.938.658.029		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR
3		4. mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya <i>hieGINE sanitation</i>		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	-			-	-	-		-	DPUPR
4				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	Rumah Tangga	300			-	-	-		-	DPUPR

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksa na
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisasi	Anggaran			
5				Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	Rumah Tangga	-		-	-	-			DPUPR	
6				Pengolahan Lumpur Tinja (IPAL)	Rumah Tangga	6.917			301.221	301.221	12.938.658.029		APBD, BANPROV, HIBAH APBN, DAK	DPUPR

### 3.2.4. Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Jepara 2023-2027

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan Perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR 2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan Perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Perumahan 4. Pengurangan lingkungan pemukiman kumuh melalui pembanguan sarana dan prasarana lingkungan meliputi pembangunan jalan lingkungan dan	1. Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial, penguatan Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan Swadaya dan fasilitasi perumahan Khusus 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh	1. Program Pengembangan Perumahan	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>		34	60	60		255.000.000	0	APBD	Disperkim		
				Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0			-	-					
				Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	34			15	15			0	APBD	Disperkim
				Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0			-	-					
				Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0			-	-					
				<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Unit	0	24	24			210.000.000	0	APBD	Disperkim	
				Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0			-	-					
				Subsidi uang sewa	Rumah	0			-	-					
	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0			6	6				APBD Provinsi	Disperkim Prov. Jawa Tengah			

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	drainase 5. Mengurangi jumlah rumah layak huni melalui rehabilitasi dan suplementasi pendanaan pembangunan serta peningkatan peran swasta (Corporate Social Responsibility) dan partisipasi masyarakat													

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan Perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR 2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan Perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat	1. Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial, penguatan Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan Swadaya dan fasilitasi perumahan Khusus  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh	1. Program Pengembangan Perumahan	<b>Penyediaan &amp; Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>		34	8	8		40.000.000	0	APBD	Disperkim		
				Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	-			-	-					
				Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	34			2	2		0	APBD	Disperkim	
				Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	-			-	-					
				Pemukiman Kembali bagi Korban Bencana	Rumah	-			-	-					
				<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					8	8		80.000.000	0	APBD	Disperkim
				Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	-					2	2			
	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	Rumah	-					-	-						

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	dan dunia usaha sebagai provider 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Perumahan 4. Pengurangan lingkungan pemukiman kumuh melalui pembanguan sarana dan prasarana lingkungan meliputi pembangunan jalan lingkungan dan drainase 5. Mengurangi jumlah rumah layak huni melalui rehabilitasi dan suplementasi pendanaan pembangunan serta peningkatan peran swasta (Corporate Social Responsibility) dan partisipasi masyarakat													

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
1	1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan Perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga	1. Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh	1. Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		34	8	8	2	2	40.000.000	0	APBD	Disperkim	
				Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0									
				Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	34	8	8	2	2	40.000.000	0	APBD	Disperkim	
				Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0									

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR	dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial, penguatan Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan Swadaya dan fasilitasi perumahan Khusus	Program Kabupaten/Kota	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0								
	2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan Perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider	2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh	3. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8	8	2	2	80.000.000	0	APBD	Disperkim
	3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Perumahan		Program Kabupaten/Kota	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1					0	APBD	Disperkim	
	4. Pengurangan lingkungan pemukiman kumuh melalui pembangunan sarana dan prasarana lingkungan meliputi pembangunan jalan lingkungan dan drainase			Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0								
	5. Mengurangi jumlah rumah layak huni melalui rehabilitasi dan suplementasi pendanaan pembangunan serta peningkatan peran swasta (Corporate Social Responsibility) dan partisipasi masyarakat			Subsidi uang sewa	Rumah	0								
				Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	8	8	2	2	80.000.000			

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
1	1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan Perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR 2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan Perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Perumahan 4. Pengurangan lingkungan pemukiman kumuh melalui pembangunan sarana dan prasarana lingkungan meliputi pembangunan jalan lingkungan dan drainase 5. Mengurangi jumlah rumah layak huni melalui rehabilitasi dan	1. Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial, penguatan Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan Swadaya dan fasilitasi perumahan khusus  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh	1. Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		34	8	8	2	2	40.000.000	0	APBD	Disperkim		
				Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0										
				Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	34	8	8	2	2	40.000.000	0	APBD	Disperkim		
				Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0										
				Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0										
				Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					8	8	2	2	80.000.000	0	APBD	Disperkim
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1								0	APBD	Disperkim
				Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0										
	Subsidi uang sewa	Rumah	0													
	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	8	8	2	2	80.000.000								

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	suplementasi pendanaan pembangunan serta peningkatan peran swasta (Corporate Social Responsibility) dan partisipasi masyarakat													

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
1	1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan Perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi MBR 2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan Perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider 3. Meningkatkan kualitas	1. Memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang yang meliputi: pengendalian Perumahan Komersial, penguatan Perumahan Umum, Rumah Susun, pemberdayaan Perumahan Swadaya dan fasilitasi perumahan Khusus  2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di kawasan permukiman kumuh	1. Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		34	8	8	2	2	40.000.000	0	APBD	Disperkim		
				Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	0										
				Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	34	8	8	2	2	40.000.000	0	APBD	Disperkim		
				Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	0										
				Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	0										
				3. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				8	8	2	2	80.000.000	0	APBD	Disperkim
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen	1								0	APBD	Disperkim
				Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0										
	Subsidi uang sewa	Rumah	0													

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satua n	Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM 2027					Ini si asi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisa si	Mutu Layana n	Realisa si	Anggaran			
	perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan 4. Pengurangan lingkungan pemukiman kumuh melalui pembanguan sarana dan prasarana lingkungan meliputi pembangunan jalan lingkungan dan drainase 5. Mengurangi jumlah rumah layak huni melalui rehabilitasi dan suplementasi pendanaan pembanguan serta peningkatan peran swasta (Corporate Social Responsibility) dan partisipasi masyarakat			Penyediaan rumah layak huni	Rumah	0	8	8	2	2	80.000.000			

**3.2.5. Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Jepara 2023-2027**

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Meningkatkan pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda/Perkada	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota 3. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	<b>Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>		2	1	1	0	0	884.958.000		APBD	SATTP OL PP DAN DAMKAR
				1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	1			1	1				
				2. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang									
				3. Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Dokumen	6			6	6				
				4. Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Unit	28			28	28				
				5. Standar Peningkatan kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Linmas	Orang	37			37	37				
				6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada	Dokumen	2			2	2				
2	Memenuhi waktu tanggap darurat pelayanan kebakaran	1. Peningkatan pelayanan kebakaran 2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan kebakaran	1. Pencegahan ,Pengendalian ,pemadaman , Penyelamatan dan Penangan Bahan Berbahaya dan Bearcun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 2. Inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran	<b>Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran ( DAMKAR)</b>		80	58	58		186.000.000		APBD	SATTP OL PP DAN DAMKAR	
				1. Tingkat Tanggap Waktu Responstime	Layanan	15			58					58
				2. prosedur Oprasional Penanganan Kebakaran	Dokumen	2			2					2
				3. Sarana Prasana Pemadan Kebakaran	Unit	41			41					41

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			3. Investigasi Kejadian Kebakaran 4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	4. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sumber Daya Manusia	Orang	31			31	31				
				5. Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evaluasi bagi Warga Negara yang Menjadi korban Kebakaran	Layanan	58			58	58				
				6. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran	Layanan	58			58	58				
3	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;  2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;  3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, Peralatan dan Logistik;  4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>		1.235.018	1.192.811	1.192.811			374.000.000		APBD	BPBD
				Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	1			1	1				
				Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	1			1.192.811	1.192.811				
				Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	80			1.192.811	1.192.811				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
		5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	28			34	34					
		6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		320	620	620			412.000.000		APBD	BPBD	
		7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana		Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	53			163	163					
				Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	25			40	40					
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		3130	4.759	4.759			62.099.500		APBD	BPBD	
				Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pUSDalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			1	1					
				Pendataan terhadap warga yang	orang	3130			4.759	4.759					

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				terkena/menjadi korban bencana										
				Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1			2	2				
				Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	1			0	0				
				Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	3130			12	12				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Meningkatkan pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda/Perkada	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota 3. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS ) Kabupaten / Kota	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> 1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil 2. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan 3. Standar Operasional Prosedur Satpol PP 4. Standar Sarana Prasarana Satpol PP		2	2	2			1.000.000		APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR
					Orang	1			1	1				
					Orang	1			2	2				
					Dokumen	6			6	6				
					Unit	28			28	28				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				5. Standar Peningkatan kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Linmas	Orang	37			43	43				
				6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara	Dokumen	2			2	2				
2	Memenuhi waktu tanggap darurat pelayanan kebakaran	1. Peningkatan pelayanan kebakaran 2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan kebakaran	1. Pencegahan ,Pengendalian ,pemadaman , Penyelamatan dan Penangan Bahan Berbahaya dan Bearcun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 2. Inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran 3. Investigasi Kejadian Kebakaran 4. Penyelenggaraan Oprasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	<b>Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran ( DAMKAR)</b> 1. Tingkat Tanggap Waktu Respon time 2. prosedur Oprasional Penanganan Kebakaran 3. Sarana Prasana Pemadan Kebakaran 4. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sumber Daya Manusia 5. Pelayanan Pemadaman ,Penyelamatan dan Evaluasi bagi Warga Negar yang Menjadi korban Kebakaran 6. Pelayan Penyelamatan Dan Evakuasi bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran		80	80	80			90.000.000		APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR
					Layanan	15			80	80				
					Dokumen	2			2	2				
					Unit	41			41	41				
					Orang	31			31	31				
					Layanan	80			80	80				
					Layanan	80			80	80				
3	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>		1.235.018	1.192.811	1.192.811			200,000,000		APBD	BPBD

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
		2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;		Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	0			1	1				
		3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, Peralatan dan Logistik;		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	0				1192811	1192811			
		4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	80			40	40				
		5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	28			24	24				
		6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		320	140	140			292,000,000		APBD	BPBD
		7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana		Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	53			140	140				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	25			70	70				
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		3130	17565	17565			65,000,000		APBD	BPBD
				Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			1	1				
				Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	3130			17565	17565				
				Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1			1	1				
				Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	0			0	0				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	3130			12	12				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana			
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran						
1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Meningkatkan pengendalian dan penanganan ketertarikan dan ketertiban umum 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda/Perkada	1. Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota 3. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Kabupaten / Kota	<b>Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum</b>		2	923.000						APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR			
				1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	Orang	1										2	2
				2. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1										2	2
				3. Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Dokumen	6										6	6
				4. Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Unit	28										28	28
				5. Standar Peningkatan kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Linmas	Orang	37										37	37
6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada	Dokumen	2		2	2												
2	Memenuhi waktu tanggap darurat pelayanan kebakaran	1. Peningkatan pelayanan kebakaran 2. Peningkatan sarana prasarana penunjang	1. Pencegahan ,Pengendalian ,pemadaman , Penyelamatan dan Penangan Bahan Berbahaya dan Bearcun	<b>Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran ( DAMKAR)</b>		80	275.00.000						APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR			
				1. Tingkat Tanggap Waktu Responstime	Layanan	15										80	80

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
		elayanan kebakaran	Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 2. Inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran 3. Investigasi Kejadian Kebakaran 4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	2. prosedur Oprasional Penanganan Kebakaran	Dokumen	2			2	2				
				3. Sarana Prasana Pemadam Kebakaran	Unit	41			41	41				
				4. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sumber Daya Manusia	Orang	31			31	31				
				5. Pelayanan Pemadaman ,Penyelamatan dan Evaluasi bagi Warga Negar yang Menjadi korban Kebakaran	Layanan	80			80	80				
				6. Pelayan Penyelamatan Dan Evakuasi bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran	Layanan	80			80	80				
3	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;  2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;  3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, Peralatan dan Logistik;	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		1.235.018	1.192.811	1.192.811			30.250.000		APBD	BPBD
				Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	0			NA	NA		1.235.018		
				Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	0			NA	NA				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
		4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	80			55	55					
		5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	28			22	22					
		6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		320	1.192.811	1.192.811			370.650.000		APBD	BPBD	
		7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana		Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	53			163	163					
				Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	25			70	70					
				Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		3130	1.192.811	1.192.811			231.583.220		APBD	BPBD

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	<i>posko</i>	1			1	1				
				Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	<i>orang</i>	3130			NA	NA				
				Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	<i>dokumen</i>	1			12	12				
				Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	<i>layanan</i>	-			NA	NA				
				Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	<i>layanan</i>	3130			12	12				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Meningkatkan pengendalian dan penanganan ketentrangan dan ketertiban umum 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda/Perkada	1. Penanganan Gangguan Ketentrangan dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota 3. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	<b>Pelayanan Ketentrangan dan Ketertiban Umum</b>		2	2	2			923.000.000		APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR
				1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materiil	Orang	1			2	2				
				2. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1			2	2				
				3. Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Dokumen	6			6	6				
				4. Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Unit	28			28	28				
				5. Standar Peningkatan kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Linmas	Orang	37			37	37				
				6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada	Dokumen	2			2	2				
2	Memenuhi waktu tanggap darurat pelayanan kebakaran	1. Peningkatan pelayanan kebakaran 2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan kebakaran	1. Pencegahan ,Pengendalian ,pemadaman , Penyelamatan dan Penangan Bahan Berbahaya dan Bearcun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 2. Inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran 3. Investigasi Kejadian Kebakaran 4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap	<b>Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran ( DAMKAR)</b>		80	80	80			275.000.000		APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR
				1. Tingkat Tanggap Waktu Respon time	Layanan	15			80	80				
				2. prosedur Oprasional Penanganan Kebakaran	Dokumen	2			2	2				
				3. Sarana Prasana Pemadan Kebakaran	Unit	41			41	41				
				4. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sumber Daya Manusia	Orang	31			31	31				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksanaan
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Kondisi Membahayakan Manusia	5. Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evaluasi bagi Warga Negara yang Menjadi korban Kebakaran	Layanan	80			80	80				
				6. Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran	Layanan	80			80	80				
3	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan kerentanan bencana	1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;  2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;  3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, Peralatan dan Logistik;  4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;  5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)		1.235.018	1.192.811	1.192.811			33.275.000		APBD	BPBD
				Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	0			NA	NA				
				Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	0			NA	NA				
				Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	80			40	40				
				Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	28			22	22				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
		6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana; 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		320	1.192.811	1.192.811			407.715.000		APBD	BPBD
				Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	unit	53			2	2				
				Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	25			110	110				
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		3130	1.192.811	1.192.811			194.741.542			
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			2	2						
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana		orang	3130			NA	NA					

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1			12	12				
				Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-			NA	NA				
				Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	3130			12	12				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1. Meningkatkan pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran Perda/Perkada	1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Satu Daerah Kabupaten /Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati /Walikota 3. Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		2					923.000.000		APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR
				1. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	Orang	1			1	1				
				2. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	Orang	1			1	1				
				3. Standar Operasional Prosedur Satpol PP	Dokumen	6			6	6				
				4. Standar Sarana Prasarana Satpol PP	Unit	28			28	28				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				5. Standar Peningkatan kapasitas Anggota Satpol PP dan Anggota Linmas	Orang	37			43	43				
				6. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkara	Dokumen	2			2	2				
2	Memenuhi waktu tanggap darurat pelayanan kebakaran	1. Peningkatan pelayanan kebakaran 2. Peningkatan sarana prasarana penunjang pelayanan kebakaran	1. Pencegahan ,Pengendalian ,pemadaman , Penyelamatan dan Penangan Bahan Berbahaya dan Bearcun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota 2. Inspeksi peralatan Proteksi Kebakaran 3. Investigasi Kejadian Kebakaran 4. Penyelenggaraan Oprasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	<b>Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran ( DAMKAR )</b>		80		80			275.000.000		APBD	SATPOL PP DAN DAMKAR
				1. Tingkat Tanggap Waktu Resptime	Layanan	15			80	80				
				2. prosedur Oprasional Penanganan Kebakaran	Dokumen	2			2	2				
				3. Sarana Prasana Pemadan Kebakaran	Unit	41			41	41				
				4. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sumber Daya Manusia	Orang	31			31	31				
				5. Pelayanan Pemadaman ,Penyelamatan dan Evaluasi bagi Warga Negar yang Menjadi korban Kebakaran	Layanan	80			80	80				
				6. Pelayan Penyelamatan Dan Evakuasi bagi Warga Negara yang Terdampak Kebakaran	Layanan	80			80	80				
3	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penurunan	1. Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan;	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)</b>		1.235.018	1.192.811	1.192.811			33.275.000		APBD	BPBD

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	kerentanan bencana													
		2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;		Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	dokumen	0			NA	NA				
		3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, Peralatan dan Logistik;		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	orang	0			NA	NA				
		4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	orang	80			40	40				
		5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;		Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	unit	28			22	22				
		6. Penguatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>		320	1.192.811	1.192.811			407.715.000		APBD	BPBD
		7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana		Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko	unit	53			2	2				

NO	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Kondisi Capaian Tahun Dasar (2022)	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				kesehatan, air sanitasi, .... dll)										
				Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	25			110	110				
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		3130	1.192.811	1.192.811			194.741.542		APBD	BPBD
				Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terfaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	posko	1			2	2				
				Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	3130			NA	NA				
				Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	1			12	12				

3.2.6. Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Jepara 2023-2027

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2023)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan penyandang disabilitas	Menumbuh kembangkan program pengembangan potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		100%	489	489	489	489	519.003.200		APBD	DINAS SOSIAL
a				Layanan Data dan Pengaduan	orang		-	-	-	-	-			
b				Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang		-	-	-	-	-			
c				Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	orang	100	100	100	100	100	23.250.000			
d				Penyediaan Sandang	orang		-	-	-	-	-			
e				Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	pcs	150	150	150	150	150	313.777.000			
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
g				Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di	orang	10	150	150	150	150	32.290.000			

No.	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2023)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial											
h			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang		83	83	83	83	143.686.200			
i				Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang		-	-	-	-	-			
j				Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
k			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2023)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana		
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran					
			Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga													
m				Layanan Rujukan	orang		-	-	-	-	-					
2	Pengembangan program perlindungan hak anak terhadap eksploitasi fisik dan mental	Memberikan bantuan dan penguatan spiritual anak secara intens		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	100%	823	823	823	823	244.736.200		APBD	DINAS SOSIAL		
a				Layanan Data dan Pengaduan	orang		-	-	-	-	-					
b				Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyediaan Permakanan	orang	650	650	650	650	650	151.125.000				
c					Penyediaan Sandang	orang		-	-	-	-	-				
d						Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-				
e						Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-				
f					Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	15	150	150	150	150	49.500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2023)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual											
g			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	orang		15	15	15	15	36.111.200			
h				Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		-	-	-	-	-			
i				Akses ke Layanan Pendidikan	orang		-	-	-	-	-			
j			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		4	4	4	4	4.000.000			
k			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		4	4	4	4	4.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2023)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Pelayanan Reunifikasi Keluarga											
l			Layanan Rujukan		orang		-	-	-	-				
m			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti		orang		-	-	-	-				
n			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		orang		-	-	-	-				
o			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan		orang		-	-	-	-				
3	Penguatan dan pengembangan nilai-nilai kebersamaan dan sayang	Mewujudkan pemberian bimbingan spiritual kepada	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial		orang	100%	269	269	269	269	71.835.000		APBD	DINAS SOSIAL
a			Layanan Data dan Pengaduan		orang		-	-	-	-				

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2023)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
b	kepada lansia di dalam keluarga	masyarakat dan lansia		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		-	-	-	-	-				
c			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	orang	50	50	50	50	50	11.625.000				
d				Penyediaan Sandang	orang		-	-	-	-	-				
e				Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-				
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-				
g				Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang		150	150	150	150	20.680.000			
h				Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	160	65	65	65	65	35.530.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar											
i				Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang		-	-	-	-	-			
j				Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
k			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		1	1	1	1	1.000.000			
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		1	1	1	1	1.000.000			
m				Layanan Rujukan	orang		-	-	-	-	-			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
g			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual</b>	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	20	-	-	-	-	-			
h			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar</b>	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang		2	2	2	2	1.431.000			
i				Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		-	-	-	-	-			
j				Akses ke Layanan Pendidikan	orang		-	-	-	-	-			
k			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian</b>	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Pelayanan Penelusuran Keluarga											
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
m				Layanan Rujukan	orang		-	-	-	-	-			
n				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang		-	-	-	-	-			
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		-	-	-	-	-			
5	Penguatan koordinasi antar instansi yang menangani korban bencana	Bergerak cepat dalam penanganan korban bencana		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	100%							APBD	DINAS SOSIAL

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2024)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
a			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Makanan	Penyediaan Permakanan	orang	500	400	400	400	400	170.000.000			
b			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		20	20	20	20	10.000.000			
c			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit		7	7	7	7	10.000.000			
d			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang		32	32	32	32	670.000.000			
e			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang		50	50	50	50	10.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Peningkatan peran masyarakat	Menumbuh kembangkan		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang		100%	570	570	570	570	131.359.005		APBD	DINAS SOSIAL

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	dan swasta dalam pemberdayaan penyandang disabilitas	program pengembangan potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial		Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial										
a			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		285	285	285	285	1.210.705			
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang		1	1	1	1	500.000			
c			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	orang	100	96	96	96	96	23.616.000			
d			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
e	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Penyediaan Alat Bantu	pcs	150	21	21	21	21	48.081.600					

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu											
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang									
g			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	10	5	5	5	5	14.518.500			
h			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang		150	150	150	150	34.632.200			
i			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
j			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial</b> dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan</b>	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang		1	1	1	1	500.000			
k			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial</b> dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</b>	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
l			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial</b> dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</b>	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
m			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial</b> dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan Layanan Rujukan</b>	Layanan Rujukan	orang		2	2	2	2	1.300.000			
2	Pengembangan program perlindungan hak	Memberikan bantuan dan penguatan		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	orang	100%	410	410	410	410	57.402.858		APBD	DINAS SOSIAL

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
a	anak terhadap eksploitasi fisik dan mental	spiritual anak secara intens	Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		205	205	205	205	870.858			
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	orang	650	192	192	192	192	47.232.000			
c			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
d				Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-			
e				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
f				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	15	-	-	-	-	-			
g				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	orang		-	-	-	-	-			
h				Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah	orang		1	1	1	1	500.000		

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	dan/atau Kartu Identitas Anak										
i			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		1	1	1	1	500.000			
j			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
k			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di	Layanan Rujukan	orang		2	2	2	2	1.300.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan											
m			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Dituar Panti	orang		1	1	1	1	500.000			
n				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		-	-	-	-	-			
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan	orang		-	-	-	-	-			
3	Penguatan dan pengembangan nilai-nilai kebersamaan dan sayang kepada lansia di dalam keluarga	Mewujudkan pemberian bimbingan spiritual kepada masyarakat dan lansia		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	100%	296	296	296	296	40.525.717		APBD	DINAS SOSIAL
a			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang	Layanan Data dan Pengaduan	orang		148	148	148	148	628.717			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan											
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		1	1	1	1	500.000			
c			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	orang	50	96	96	96	96	23.616.000			
d			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
e			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di	Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu											
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
g			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang		-	-	-	-	-			
h			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	160	40	40	40	40	7.581.000			
i			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		1	1	1	1	500.000			
j			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan											
k			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
m			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	orang		1	1	1	1	700.000			
n			Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pemeliharaan Pemeliharaan	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan	orang		-	-	-	-	-			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Pembiayaan Pemeliharaan										
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		-	-	-	-	-			
4	Optimalisasi peran dan fungsi rumah singgah dalam pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis	Memberikan pelayanan sosial yang terarah dan bermutu bagi gelandangan dan pengemis yang ada di rumah singgah		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	100%	16	16	16	16	4.733.985		APBD	DINAS SOSIAL
a			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		8	8	8	8	33.985			
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		1	1	1	1	1	500.000		

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti											
c				Penyediaan Permakanan	orang	50	-	-	-	-	-			
d			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
e				Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-			
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
g				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	20	-	-	-	-	-			
h				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang		-	-	-	-	-			
i			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		1	1	1	1	500.000			
j			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan											
k			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		1	1	1	1	1.000.000			
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		1	1	1	1	1.000.000			
m			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	orang		1	1	1	1	700.000			
n				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan	orang		-	-	-	-	-			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Pembiayaan Pemeliharaan										
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang									
5	Penguatan koordinasi antar instansi yang menangani korban bencana	Bergerak cepat dalam penanganan korban bencana		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	100%						APBD	DINAS SOSIAL	
a			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Makanan	Penyediaan Permakanan	orang	500	400	400	400	400	170.000.000			
b			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		20	20	20	20	10.000.000			
c			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit		7	7	7	7	10.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2025)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
d			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang		32	32	32	32	670.000.000			
e			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang		50	50	50	50	10.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan penyandang disabilitas	Menumbuh kembangkan program pengembangan potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		100%	570	570	570	570	131.359.005		APBD	DINAS SOSIAL
a			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		285	285	285	285	1.210.705			
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Institusi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			<b>Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat</b>											
c			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan</b>	Penyediaan Permakanan	orang	100	96	96	96	96	23.616.000			
d			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang</b>	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
e			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu</b>	Penyediaan Alat Bantu	pcs	150	21	21	21	21	48.081.600			
f			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</b>	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang									
g			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang</b>	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	10	5	5	5	5	14.518.500			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan											
h			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang		150	150	150	150	34.632.200			
i			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	orang		1	1	1	1	500.000			
j			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
k			<b>Program</b> Rehabilitasi Sosial/ <b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
l			<b>Program</b> Rehabilitasi Sosial/ <b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
m				Layanan Rujukan	orang		2	2	2	2	1.300.000			
2	Pengembangan program perlindungan hak anak terhadap eksploitasi fisik dan mental	Memberikan bantuan dan penguatan spiritual anak secara intens		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial</b>	orang	<b>100%</b>	410	410	410	410	57.402.858		APBD	DINAS SOSIAL
a			<b>Program</b> Rehabilitasi Sosial/ <b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan</b> Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		205	205	205	205	870.858			
b			<b>Program</b> Rehabilitasi Sosial/ <b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	orang	<b>650</b>	192	192	192	192	47.232.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
c			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang</b>	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
d				Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-			
e				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
f				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	15	-	-	-	-	-			
g				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	orang		-	-	-	-	-			
h			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak</b>	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		1	1	1	1	500.000			
i			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan</b>	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
j			<b>Program</b> Rehabilitasi Sosial/ <b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
k			<b>Program</b> Rehabilitasi Sosial/ <b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan</b> Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
l			<b>Program</b> Rehabilitasi Sosial/ <b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan</b> Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	orang		2	2	2	2	1.300.000			
m			<b>Program</b> Rehabilitasi Sosial/ <b>Kegiatan</b> Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial <b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
n				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		-	-	-	-	-			
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang		-	-	-	-	-			
3	Penguatan dan pengembangan nilai-nilai kebersamaan dan sayang kepada lansia di dalam keluarga	Mewujudkan pemberian bimbingan spiritual kepada masyarakat dan lansia		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	100%	296	296	296	296	40.525.717		APBD	DINAS SOSIAL
a			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar-Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		148	148	148	148	628.717			
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti											
c			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyangang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	orang	50	96	96	96	96	23.616.000			
d			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyangang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
e			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyangang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-			
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
g			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyangang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang		-	-	-	-	-			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
h			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar</b>	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	160	40	40	40	40	7.581.000			
i			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak</b>	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		1	1	1	1	500.000			
j			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan</b>	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		1	1	1	1	500.000			
k			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian</b>	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Pelayanan Penelusuran Keluarga											
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
m			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	orang		1	1	1	1	700.000			
n			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang		-	-	-	-	-			
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		-	-	-	-	-			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana	
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				
4	Optimalisasi peran dan fungsi rumah singgah dalam pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis	Memberikan pelayanan sosial yang terarah dan bermutu bagi gelandangan dan pengemis yang ada di rumah singgah		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	100%	16	16	16	16	4.733.985		APBD	DINAS SOSIAL	
a			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		8	8	8	8	33.985				
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		1	1	1	1	500.000				
c				Penyediaan Permakanan	orang	50	-	-	-	-	-				
d			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000				
e				Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-				

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
g				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	20	-	-	-	-	-			
h				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang		-	-	-	-	-			
i			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak</b>	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		1	1	1	1	500.000			
j			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan</b>	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		1	1	1	1	500.000			
k			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</b>	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		1	1	1	1	1.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		1	1	1	1	1.000.000			
m			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	orang		1	1	1	1	700.000			
n				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang		-	-	-	-	-			
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		-	-	-	-	-			
5	Penguatan koordinasi antar instansi yang	Bergerak cepat dalam penanganan		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat	orang	100%							APBD	DINAS SOSIAL

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2026)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
	menangani korban bencana	korban bencana		<b>Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota</b>										
a			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Makanan	Penyediaan Permakanaan	orang	500	400	400	400	400	170.000.000			
b			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		20	20	20	20	10.000.000			
c			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit		7	7	7	7	10.000.000			
d			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang		32	32	32	32	670.000.000			
e			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang		50	50	50	50	10.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	Peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam pemberdayaan penyandang disabilitas	Menumbuh kembangkan program pengembangan potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial		100%	570	570	570	570	131.359.005		APBD	DINAS SOSIAL
a			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		285	285	285	285	1.210.705			
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	orang		1	1	1	1	500.000			
c			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	orang	100	96	96	96	96	23.616.000			
d			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
e			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi	Penyediaan Alat Bantu	pcs		150	21	21	21	21	48.081.600		

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu											
f			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang									
g			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	orang	10	5	5	5	5	14.518.500			
h			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	orang		150	150	150	150	34.632.200			
i			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Anak / Bukti dokumen kependudukan										
j			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	orang		1	1	1	1	500.000			
k			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
m			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Layanan Rujukan	orang		2	2	2	2	1.300.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan											
2	Pengembangan program perlindungan hak anak terhadap eksploitasi fisik dan mental	Memberikan bantuan dan penguatan spiritual anak secara intens		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	100%	410	410	410	410	57.402.858		APBD	DINAS SOSIAL
a			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		205	205	205	205	870.858			
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	orang	650	192	192	192	192	47.232.000			
c			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
d				Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-			
e				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
f				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	15	-	-	-	-	-			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
g				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	orang		-	-	-	-	-			
h			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		1	1	1	1	500.000			
i			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		1	1	1	1	500.000			
j			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
k			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga											
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan	Layanan Rujukan	orang		2	2	2	2	1.300.000			
m			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		1	1	1	1	500.000			
n				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		-	-	-	-	-			
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan	orang		-	-	-	-	-			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				Pembiayaan Pemeliharaan										
3	Penguatan dan pengembangan nilai-nilai kebersamaan dan sayang kepada lansia di dalam keluarga	Mewujudkan pemberian bimbingan spiritual kepada masyarakat dan lansia		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	orang	100%	296	296	296	296	40.525.717		APBD	DINAS SOSIAL
a			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan	Layanan Data dan Pengaduan	orang		148	148	148	148	628.717			
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		1	1	1	1	500.000			
c			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Penyediaan Permakanan	orang	50	96	96	96	96	23.616.000			
d			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang											
e			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-			
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
g			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang		-	-	-	-	-			
h			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	orang	160	40	40	40	40	7.581.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
i			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak</b>	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	orang		1	1	1	1	500.000			
j			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan</b>	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		1	1	1	1	500.000			
k			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga</b>	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			
l			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</b>	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		3	3	3	3	3.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
m			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan</b>	Layanan Rujukan	orang		1	1	1	1	700.000			
n			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan</b>	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang		-	-	-	-	-			
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		-	-	-	-	-			
4	Optimalisasi peran dan fungsi rumah singgah dalam pelayanan sosial bagi gelandangan dan pengemis	Memberikan pelayanan sosial yang terarah dan bermutu bagi gelandangan dan pengemis yang ada di rumah singgah		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	orang	100%	16	16	16	16	4.733.985		APBD	DINAS SOSIAL
a			<b>Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub</b>	Layanan Data dan Pengaduan	orang		8	8	8	8	33.985			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			Kegiatan Layanan Data dan Pengaduan											
b			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	orang		1	1	1	1	500.000			
c				Penyediaan Permakanan	orang	50	-	-	-	-	-			
d			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		2	2	2	2	500.000			
e				Penyediaan Alat Bantu	orang		-	-	-	-	-			
f				Penyediaan Perbekalan Kesehatan	orang		-	-	-	-	-			
g				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual	orang	20	-	-	-	-	-			
h				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	orang		-	-	-	-	-			
i			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta	orang		1	1	1	1	500.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak										
j			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan	Akses ke Layanan Pendidikan	orang		1	1	1	1	500.000			
k			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	orang		1	1	1	1	1.000.000			
l			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar,lansia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	orang		1	1	1	1	1.000.000			
m			Program Rehabilitasi Sosial/Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak terlantar,lansia terlantar serta	Layanan Rujukan	orang		1	1	1	1	700.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
			gefandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan Layanan Rujukan											
n				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	orang		-	-	-	-	-			
o				Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	orang		-	-	-	-	-			
5	Penguatan koordinasi antar instansi yang menangani korban bencana	Bergerak cepat dalam penanganan korban bencana		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	100%						APBD	DINAS SOSIAL	
a			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Makanan	Penyediaan Permakanan	orang	500	400	400	400	400	170.000.000			
b			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Sandang	Penyediaan Sandang	orang		20	20	20	20	10.000.000			

No	Strategi	Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	satuan	Capaian Tahun (2022)	Target SPM (2027)					Inisiasi	Pendanaan	Pelaksana
							Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
c			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	unit		7	7	7	7	10.000.000			
d			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	orang		32	32	32	32	670.000.000			
e			Program Penanganan bencana/Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota/Pelayanan Dukungan Psikososial	Pelayanan Dukungan Psikososial	orang		50	50	50	50	10.000.000			

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

- kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
  - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM**

#### **4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM**

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. **Ketaatan/*compliance***, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. **Pemeriksaan/*auditing***, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. **Laporan/*accounting***, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Jepara, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
  3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
  4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
    5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
    6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?

7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
  - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
  - 2) Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
  - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
  - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
  - 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
  - 6) Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
  - 7) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
  - 8) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan

data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### **4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM**

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?

- 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
  - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
  - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
  - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Jepara masih rendah diakibatkan:

1. Belum tersedia data yang valid untuk menentukan kebutuhan penyediaan layanan sehingga penyusunan perencanaan maupun target capaian tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan yang sebenarnya di lapangan.
2. Penetapan target Standar Pelayanan Minimal belum mendasarkan data kebutuhan pada masing-masing bidang urusan sehingga capaian layanan bagi sasaran penerima layanan secara keseluruhan belum bisa dipetakan.
3. Keterbatasan kemampuan pendanaan/ anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan/ membiayai penyediaan pelayanan dasar yang dibebankan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sehingga sasaran penerima pelayanan dasar belum semuanya tercapai (Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan SPM tidak dirinci per indikator, namun masih global dalam satu program dan kegiatan)

#### **5.2. Saran**

1. Pengintegrasian program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penerapan dan pencapaian SPM yang ditetapkan oleh masing-masing Kementerian.
2. Menyediakan data yang valid pada masing-masing jenis layanan dasar sebagai dasar dalam penyusunan kebutuhan dan rencana pemenuhan.

3. Perangkat daerah pengampu SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan penganggaran agar memprioritaskan belanja daerah untuk memenuhi barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan jenis dan standar mutu pemenuhan layanan dasar pada 6 bidang urusan Standar Pelayanan Minimal.
4. Menguatkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh komponen baik pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
6. Diperlukan integrasi pelaporan antara pelaporan kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat baik melalui Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian teknis agar pelaporan lebih efisien.
7. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Jepara berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
8. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>
9. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama Corporate Social Responsibility (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal ...

BUPATI JEPARA  
WITIARSO UTOMO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, ttd  
ARY BACHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024 NOMOR ...

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Jepara.

BUPATI JEPARA,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Witiarso Utomo', written over a horizontal line.

WITIARSO UTOMO